

DINAMIKA POLITIK PARTAI GOLKAR 1998-2004



SKRIPSI

Disusun Oleh :

BRIAN ANDRY JATMIKO

K4406012

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

DINAMIKA POLITIK PARTAI GOLKAR 1998-2004

Oleh :

BRIAN ANDRY JATMIKO

K4406012

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

Pendidikan Program Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Tri Yuniyanto, M. Hum
NIP.196506271990031003

Drs. Djono, M.Pd
NIP. 196307021990031005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota I :

Anggota II :

Disahkan oleh :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP. 19621126 198103 1 001

ABSTRAK

Brian Andry Jatmiko. K4406012. DINAMIKA POLITIK PARTAI GOLKAR 1998-2004. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Agustus 2010.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Strategi politik Partai Golkar pasca Munaslub 1998, (2) Konflik internal dan eksternal Partai Golkar, (3) Dampak konflik terhadap perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber surat kabar yang terbit pada tahun 1998-2000-an, diantaranya adalah Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Gatra, Tempo, Republika. Buku-buku literature yang digunakan antara lain: *The Golkar Way*, karangan Akbar Tandjung; *Menggugat Kemandirian Golkar*, karangan Andreas Pandiangan; *Dari Beringin Ke Beringin*, karangan Umar Ibn Alkhatab; *Golkar Retak ?*, karangan Bimo Nugroho; *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*, karangan Kholid Novianto. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan ketajaman dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian dengan melalui empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Golkar menjadi kendaraan politik yang efektif bagi rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Ketika reformasi dan perubahan politik menuju demokrasi terjadi. Golkar sebagai pendukung utama rezim Soeharto ini kehilangan patron politiknya. Dalam menghadapi kondisi yang demokratis, Golkar mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Hasil dari Munaslub itu, Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum Golkar, Golkar berubah menjadi Partai Golkar, dan merubah AD/ART Partai Golkar, (2) Banyak terjadi konflik dalam tubuh Partai Golkar. Konflik internal terjadi pada bulan 1998 setelah pihak yang kalah dalam Munaslub mulai membuat partai baru. Konflik internal selanjutnya terjadi pada Juli 1999 mengenai pro dan kontra tentang laporan pertanggungjawaban BJ Habibie. Konflik eksternal banyak muncul dari masyarakat terutama mahasiswa. Mereka menuntut pembubaran Partai Golkar yang dianggap sebagai sumber utama krisis. Partai Golkar juga dihadapkan terhadap keppres mengenai pembekuan Partai Golkar yang terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur, (3) Begitu banyak konflik yang melanda Partai Golkar, tidak membuat partai ini menciut. Partai Golkar justru mampu bertahan dengan membuktikan sebagai pemenang pada Pemilu 2004. Partai Golkar mampu mengalahkan suara PDIP yang pada Pemilu 1999 menjadi pendulang suara terbanyak. Partai Golkar meraih suara 21,58% dan memenangkan suara terbanyak di 26 provinsi, hal ini karena Partai Golkar berhasil mempertahankan pendukungnya di daerah-daerah.

ABSTRACT

Brian Andry Jatmiko. K4406012. POLITICAL DINAMICS OF THE GOLKAR PARTY 1998-2004. Skripsi, Surakarta: Faculty of Education and Teacher Training, Sebelas Maret University, August 2010.

The purpose of this study is to describe: (1) political strategy post Munaslub Golkar Party in 1998, (2) internal and external conflicts of the Golkar Party, (3) The impact of conflict on the votes of the Golkar Party in elections in 2004.

This study uses the historical method. Source data used is the source of the newspaper which was published in the year 1998-2000's, such as Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Gatra, Tempo. Literature books used include: The Golkar Way, written by Akbar Tandjung; Menggugat Kemandirian Golkar, written by Andreas Pandiangan; Dari Beringin ke Beringin, written by Ibn Umar Alkhatab; Golkar Retak ? , By Bimo Nugroho; Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi, by Kholid Novianto. Data collection techniques using literature study. Analysis using techniques of historical analysis, that analysis which put the sharpness in processing a data history. With research procedures through four stages which include: heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

Based on the results of this study concluded: (1) Golkar became an effective political vehicle for the New Order regime under the leadership of President Soeharto. When reform and political change toward democracy occurred. Golkar as the main supporter of the Suharto regime was losing its political patrons. In the face of a democratic state, Golkar held an Extraordinary Congress (Munaslub). Results from Munaslub it, Akbar Tandjung was elected general chairman of Golkar, Golkar became Golkar Party, and changed the bylaws of the Golkar Party, (2) A lot of conflict within the Golkar Party. Internal conflicts occurred in 1998 after losing side in Munaslub begin creating a new party. Subsequent internal conflicts occurred in July 1999 on the pros and cons of BJ Habibie's accountability report. Many external conflicts arise from the public, especially students. They demanded the dissolution of the Golkar Party, which is considered as the main source of crisis. Golkar Party also faced against Golkar Party Presidential Decree on the freezing that occurred during the reign of Gus Dur, (3) So many conflicts that hit the Golkar Party, did not make this party is shrinking. Golkar Party to prove it can survive as a winner in the election in 2004. Golkar party which can defeat PDIP vote in the election in 1999 became the most votes miners. Golkar Party won 21.58% votes and won the most votes in 26 provinces, this is because of the Golkar Party, successfully defended his supporters in the regions.

MOTTO

Perbedaan besar antara pemimpin sejati dan palsu adalah yang satu memandang ke depan, sedang yang lain hanya memandang masa kini; yang satu hidup dari hari ke hari dan bertindak berdasarkan kepentingan, dan yang lain bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kekal dan untuk keabadian.

(Edmund Burke)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Ibu Tercinta
- ❖ Adikku tersayang, Ririn Windha Wardani
- ❖ R.I.A, always in my deepest heart
- ❖ Nenek dan saudara-saudaraku
- ❖ Teman-teman Rekishi, UPKD, KMK, PERPUST, KUADRAN PRIVAT
- ❖ Teman-teman Pendidikan Sejarah 2006
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penulisan Skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, atas segala bentuk bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Bapak Drs. Syaiful Bachri, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. Djono, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Tri Yuniyanto, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Djono, M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu yang setiap malam mendoakan dan setiap butir tetes air mata dan keringatnya yang terurai untuk memberikan semangat hidup.
7. Keluarga besar H. Edy Saleh yang telah banyak membantu penulis ketika melakukan penelitian di Jakarta.

Sahabat-sahabat Rekhisi (Nur Thoriq Aziz, Mukhlis, Budi Hanggono), Pengurus Perpustakaan Prodi Sejarah (Rika inggit, Tina, Shinta, Dian, Yusuf, Cahyo, Eko, Tri, Fitria, Lele, Aulia, Renda, Wulan, Kikis, Lila

8. Anis), Pengurus Kuadran Privat (Mas Dodik, Yani, Thoriq, Sigit, Eni), Temen-temen UPKD, KMK dan Pak Eko "Photo Copy".
9. Sahabat-sahabat Pendidikan Sejarah 2006 yang telah banyak memberikan canda tawa, semoga kekeluargaan dan persahabatan kita akan tetap terjalin selamanya..

Semoga amal baik semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Tuhan YME.

Penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakannya. Penulis berharap semoga semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan sejarah.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
.....	ii
.....	iii 12
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIK	7
A. Tinjauan Pustaka	10
.....	16
1. Pemerintahan	23
2. Sistem Politik	
.....	
3. Partai Politik.....	25
.....	26
B. Kerangka Berpikir	27
.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
Tempat dan Waktu Penelitian	32
Metode Penelitian	36
.....	36
Sumber Data	44
.....	47
Teknik Pengumpulan Data	53
.....	54
Teknik Analisis Data	65
.....	
Prosedur Penelitian	
.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN	79
Strategi Politik Partai Golkar Pasca Munaslub 1998.....	85

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 1. Jumlah PNS di Indonesia 1974-1993	49
Tabel 2. Paradigma Lama dan Paradigma Baru Partai Golkar	52
Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilu 2004	75
Tabel 4. Perolehan Suara Pemilu 2004 di berbagai daerah	76
Tabel 5. Perolehan Suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999	77
Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan PDI-P tahun 1999 dan 2004	78

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1. Gambar Kerangka Berfikir	23
Gambar 2. Gambar Prosedur Penelitian	35
Gambar 3. Pergeseran Suara Partai Politik 1999&2004 di NAD	80
Gambar 4. Pergeseran Suara Daerah Lampung	81

LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1. Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era	100
Lampiran 2. Maklumat Presiden Republik Indonesia	103
Lampiran 3. Permintaan Fatwa Mahkamah	105
Lampiran 4. Permintaan Fatwa Mahkamah Agung	107
Lampiran 5. Surat Kabar Kompas	112
Lampiran 6. Surat Kabar Jawa Pos	123
Lampiran 7. Majalah Gatra	124
Lampiran 8. Majalah Tempo	125
Lampiran 9. Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi, Kholid Novianto, 2004	126
Lampiran 10. Kumpulan hasil-hasil RAPIM 1 GOLKAR 1998	127
Lampiran 11. Surat Permohonan Menyusun Skripsi	152
Lampiran 12. Surat Ijin Penyusunan Skripsi	153

,BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru, system kepartaian adalah hasil sejumlah factor yang dirancang oleh pemerintah, yaitu : kreasi dari aparat keamanan yang represif dalam mengatur kemapanan dan menjaga stabilitas dan tatanan politik negara, proses depolitisasi massa guna memberi kesempatan secara komplit pada kebijakan ekonomi dan pembangunan, pengebirian dan restrukturisasi partai politik, penciptaan *electoral laws* dan *electoral process* yang menjamin bahwa partai yang disponsori oleh pemerintah, yakni Golkar selalu menang dalam setiap pemilu. Dengan demikian, melalui system politik yang hegemonic dan dukungan kuat pemerintah yang represif, Golkar menjadi eksis sebagai kekuatan politik utama (Afan Gaffar, 1992).

Partai Golkar bermula ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 193/1964 yang isinya agar organisasi-organisasi yang

berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi (Suryadinata, 1992 : 14). Berdasarkan kepres tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar. Pada pembentukan awal, wadah ini tercatat 61 organisasi fungsional non afiliasi, termasuk militer (ABRI) ikut bergabung didalamnya (Murtopo, 1981 : 198).

Kehadiran Sekber Golkar dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta kekuatan-kekuatan sayap kiri lainnya (Suryadinata, 1992: 26). Dalam perkembangannya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar menjadi sebuah kekuatan politik yang luar biasa tangguh. Golkar dengan menerapkan prinsip Tiga Jalur (jalur ABG) yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar menjadi tulang punggung kekuatan politik Orde Baru. Kiprah Golkar di kancah perpolitikan nasional tak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu masa Orde Baru. (Antara News, 5/12/2008). Sejumlah penelitian tentang Golkar pada masa Orde Baru yang dilakukan Nishihara (1971), Beau (1983), Reeve (1985), Gaffar (1992), dan Rasyid (1994) secara umum menyatakan adanya suatu sistem dan mekanisme politik yang sengaja dirancang oleh rezim Orde Baru dalam rangka memenangkan Golkar pada setiap pemilu. Sistem dan mekanisme inilah yang menjadikan Golkar mampu untuk eksis dalam kepolitikan Indonesia sepanjang Orde Baru berkuasa.

Reformasi 1998 telah menghancurkan bangunan Golkar. setelah lebih dari tiga dasawarsa menikmati kekuasaan, mesin kekuasaan Orde Baru yang dikenal kokoh dan kuat ini harus menghadapi gelombang tsunami politik. Gerakan reformasi semakin menguat ketika krisis moneter yang terjadi pada juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional. Krisis yang gagal ditangani oleh rezim Soeharto tersebut menyebabkan tidak tepatnya keberhasilan ekonomi ini sebagai legitimasi. Lengsernya Soeharto telah menjadi babak baru, Golkar dipukul mundur oleh gelombang arus perubahan. Golkar seakan kehilangan pegangan dan haluan politiknya. Setelah itu berbagai tekanan politik mulai dialamatkan pada Golkar.

Bahkan berbagai kesalahan dan tuduhan mulai ditimpakan terhadap Golkar, yakni dianggap sebagai penyebab utama krisis (Kompas, 12 April 2001).

Pada masa awal reformasi setelah jatuhnya Soeharto, banyak tekanan atau desakan agar diadakan pembaruan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai politik. Atas dasar itu, pemerintah yang kemudian dipimpin oleh Presiden B.J Habibie dan parlemen mengeluarkan UU No. 2/1999 tentang partai politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi lebih kuat (*executive heavy*). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau *nevenes chikt* sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Budiardjo, 2008:449). Masyarakat kemudian mulai mendirikan partai politik untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Kreasi saluran ini tidak lagi bersifat *top down*, serba ditentukan dan diatur oleh negara, tetapi lebih bersifat *bottom up*, sesuatu yang dibangun sendiri dari bawah. Dalam tempo cepat, tidak kurang dari seratus saluran berbentuk partai politik tumbuh hampir secara bersamaan, bagaikan jamur di musim hujan (Budiardjo, 2008:250). Antusias yang meluas ini memberikan indikasi bahwa demokratisasi politik tanah air menggeliat secara perlahan sekaligus memperlihatkan derajat represi yang dialami oleh masyarakat di bawah orde baru (Alkhatab, 2008 : 33).

Antusiasme serupa juga diperlihatkan oleh para pengurus Golkar yang pernah menikmati akses dan *privilege* politik dalam pemerintahan orde baru. Mereka yang sepanjang karier birokrasi dan politiknya bernaung di bawah Golkar. Sebagian dari mereka dengan segera memasuki dan mendirikan partai politik baru. Pada tanggal 15 Januari 1999, Edi Sudradjat mendeklarasikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang berasaskan Pancasila (Jawa Pos, 16 Januari 1999). Bulan april 1999, Adi Sasono mendirikan Partai Daulat Rakyat (PDR) (Gatra, 17 april 1999). Sementara sebagian lagi dengan segera menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik mereka. Melihat kondisi yang demikian, tidak ada pilihan bagi Golkar kecuali mempercepat perubahan internal. Golkar segera

mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada 9-11 Juli 1998 di Jakarta (Gatra, 18 Juli 1998). Musyawarah ini merupakan momentum strategis dalam konteks penataan sistem organisasi Golkar. Penyelenggaraan Munaslub tersebut dimaksudkan untuk merestorasi pandangan politiknya agar sesuai dengan realitas politik baru. Secara simbolik, restorasi tersebut dimulai dengan upaya memutuskan mata rantai hubungan dengan orde baru (Tandjung, 1998 : 7). Munaslub yang diikuti oleh seluruh DPD I dan DPD II Golkar se-Indonesia tersebut selain merumuskan strategi baru dalam menghadapi perkembangan politik, juga mengagendakan pemilihan ketua umum secara demokratis. Berdasarkan hasil-hasil keputusan Munaslub, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru ; merombak struktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan. Partai Golkar juga menyusun visi partai yang baru dan mengganti AD-ART partai (Tandjung, 1998). Selain itu, hasil Munaslub juga dapat dilihat dari kemandirian partai Golkar. Sebelum reformasi, rezim orde baru memformat kekuatan politik ABRI-Birokrat-Golkar (A-B-G) dalam menjalankan kehidupan politik Indonesia. Hal ini berarti bahwa kekuatan Golkar ketika itu tidak dapat dipisahkan dari militer dan birokrasi khususnya pegawai negeri sipil. Namun, setelah reformasi Golkar memutuskan memulai kemandirian organisasi dari ketergantungan terhadap militer dan birokrasi, dan ini menjadi tantangan berat bagi Golkar. Selanjutnya Golkar juga melakukan kemandirian dana yang sebelumnya selalu mendapat kucuran dana dari lingkaran pengaruh rezim orde baru. (www.Kammi-Riau.co.id)

Dengan Munaslub ini, maka terjadilah perubahan yang sangat signifikan didalam tubuh Partai Golkar. Partai Golkar bukan hanya telah memutuskan diri (*disconnection*) dengan sistem kekuasaan lama, melainkan juga membuka lembaran baru dalam kultur politik internal sebagai refleksi kemandirian. Proses pengambilan setiap keputusan organisasi menjadi sepenuhnya bersifat mandiri, demokratis, terbuka, bottom up, dan tanpa campur tangan atau intervensi dari luar. Dengan itu pula Partai Golkar memproses dirinya menjadi partai yang modern dalam pengertian yang sebenarnya, yakni bukan sekedar *the ruler's party* seperti dalam paradigma lama.

Pasca Munaslub 1998 Golkar dihadapkan pada sejumlah tantangan dan ancaman perpecahan organisasi, dengan keluarnya tokoh-tokoh penting Golkar. Pada bulan Agustus 1998, Siswono Yudhohusodo membentuk sebuah organisasi yang bernama Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB). Kemudian setelah itu, Kemal Idris dan para pensiunan yang pernah menduduki jabatan penting ditubuh militer di masa Orde Baru mendirikan Barisan Nasional (Barnas).

Munaslub Partai Golkar telah melahirkan paradigma baru, tetapi keberhasilan tersebut telah menyulut konflik di tubuh internal Golkar (Kompas, 14 Juli 1998). Konflik-konflik yang muncul dalam Partai Golkar disebabkan oleh tiga hal, pertama, kemelut tersebut lahir oleh adanya kekosongan kekuasaan di tubuh Golkar segera setelah kejatuhan Soeharto. Kedua, disebabkan oleh kombinasi antara euforia politik di satu sisi dengan tindakan politik pragmatis jangka pendek di sisi lain untuk memanfaatkan peluang politik yang ada sekaligus menaikkan daya tawar politik yang maksimal. Dan yang ketiga merosotnya tingkat kepercayaan sebagian unsur Partai Golkar terhadap kepemimpinan Akbar Tanjung. (Alkathab, 2008 : 69). Selain menghadapi konflik internal partai, juga menghadapi tekanan eksternal yaitu menghadapi tekanan politik dan sosial berupa stigmatisasi sebagai partai berbahaya. (Kompas, 11 Januari 2001).

Partai Golkar mengalami kemerosotan perolehan suara pada pemilu 1999 (Kompas, 10 Maret 2002), akan tetapi Partai Golkar membuktikannya dengan kemenangannya pada pemilu 2004 dengan meraup 21,58 persen suara. Perolehan suara partai Golkar pada 1999 dan 2004 tidak dapat dilepaskan dari berbagai perubahan dan langkah-langkah politik partai. Menjelang pemilu 1999 partai Golkar telah hadir dengan memperkenalkan paradigma baru kepada publik, disertai dengan munculnya berbagai pernyataan dan kebijakan partai yang propembaruan (reformis). (Tandjung, 2007 : 315)

Penulisan ini bertujuan mengungkap factor-faktor dan langkah-langkah yang dapat menjadi penyebab Partai Golkar bertahan (survive) ketika terjadi perubahan politik menuju demokrasi. Selain itu, tujuan yang lain ialah untuk merekonstruksi kembali dinamika politik yang terjadi pada masa transisi tersebut,

dan berbagai langkah politik yang dilakukan Partai Golkar dalam menghadapi tantangan-tantangan era reformasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"DINAMIKA POLITIK PARTAI GOLKAR 1998-2004"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Politik Partai Golkar Pasca Munaslub 1998 ?
2. Bagaimana konflik internal dan eksternal yang terjadi di Partai Golkar?
 3. Bagaimana dampak konflik terhadap perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi politik Partai Golkar Pasca Munaslub 1998
 2. Untuk mengetahui terjadinya konflik internal dan eksternal Partai Golkar
 3. Untuk mengetahui dampak konflik terhadap perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang Dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Kependidikan Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Menurut Abu Ahmadi (1990: 121) "Pemerintahan adalah (a) suatu pengelolaan, perawatan dan pengendalian urusan umum dari suatu bagian politik, (b) sejumlah orang di mana berwenang mengambil keputusan atas nama masyarakat".

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut : "1) Mendapat awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. 2) Mendapat akhiran "an" menjadi kata

”pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki laegitimasi”. (Inu Kencana. S, 2003: 132)

Menurut Abu Daud Busroh (1989: 7) ” Pemerintahan adalah tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga Negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara”.

Pemerintahan dari arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.(S. Pamudji, 1983 : 2)

Menurut Kunjoro Purbopranoto dalam Sumbodo Tikok (1988 : 167) Pemerintah dalam arti luas (regering atau government) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tugas Negara. Dalam arti sempit (bestuur dan government) mencakup organisasi fungsi- fungsi yang menjalankan tugas pemerintah ini dapat dipandang sejajar atau .berhadapai ⁷ in fungsi peradilan dan tugas penguasa yang bukan penguasa yang bukan peradilan atau perundang-undangan penguasa atau overhei di sini diartikan dengan kekuasaan keseluruhan organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menegakan masyarakat dalam satu wadah yang mendukung kekuasaan itu disebut Negara. Singkatnya pemerintahan mempunyai kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif yang ketiganya merupakan satuan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah tata cara atau teknik dalam mengatur tata kehidupan bernegara yang tersusun secara terorganisir. Pemerintah ialah eksistensi sebuah negara. Agar dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik, maka harus dapat mempelajari dan menghubungkan pemerintah melalui kajian ilmu, yang disebut ilmu pemerintahan.

b. Sistem Pemerintahan

Istilah system pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau keseluruhan yang kompleks atau utuh (S. Pamudji, 1981)

Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara atau badan yang tertinggi yang memrintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah)
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh (<http://feeds.feedburner.com/kreativitasdalambelajar>). Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri (www.webkios.info/direktori)

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu

Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan (S. Pamudji, 1983 : 10)

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministerial (www.Tantra's.wordpress.com)

2. Sistem Politik

a. Pengertian Sistem

menurut Pamudji (1981 : 4) "sistem adalah suatu kebulatan tekad atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-

hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh”.

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Kerjasama antar subsistem akan menimbulkan hubungan yang sinergis dan sistem dianggap sebagai ”pola yang relatif tetap’ dari hubungan antara manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. (Inu Kencana, 2003: 2 dan Arifin Rahman, 1998 : 3)

Dapat disarikan pengertian dari sistem adalah satu kesatuan dari beberapa unsur yang saling berkaitan yang mempunyai tujuan.

b. Pengertian Politik

Menurut Joyce Mitchel dalam Miriam Budiarjo (1982 : 11) politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”. Pengertian politik tersebut menyangkut kegiatan pemerintah.

Kebijaksanaan umum (policy) adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Pengertian politik tersebut menyangkut soal pembagian (distribution). Pembagian kekuasaan oleh Harold Laswell dalam Miriam Budiarjo dirumuskan sebagai ”Who Gets, What, When and How”. Jadi, politik adalah masalah siapa yang mendapat kekuasaan, kapan, dan bagaimana mendapat kekuasaan tersebut. (Miriam Budiarjo, 1982 : 11)

Politik dapat pula disamakan sebagai suatu kekuasaan ataupun negara, bahkan ilmu politik diberi arti sebagai suatu ilmu untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau

sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara dengan negara atau dengan rakyatnya. (Sukarna, 1981 : 7)

Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan politik, yaitu : (1) kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud di dalam negara, seperti DPR, Presiden dan lembaga negara lainnya, (2) kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, seperti kelompok kepentingan antara lain partai politik, militer dan kelompok agama. (Miriam Budiarjo, 1982 : 35)

George Simpson dalam Bayu Surianingrat (1987 : 64) ” Politic Ist nicht anders als der Kampf um die machth. Politik adalah tidak lain daripada perjuangan untuk memperoleh kekuasaan”

c. Pengertian Sistem Politik

Menurut David Eason dalam Haryanto (1982 : 2) ”sistem politik terdiri dari tiga komponen, yaitu : 1) The Political System allocates value (by means of politic); 2) Is allocations are authoritative, and 3) Its authoritative allocations are binding the society as a whole”.

Batasan di atas berarti bahwa sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Robert Dahl dalam Inu Kencana (2003 : 2) memberikan pengertian sistem politik sebagai berikut : *”A political system is any persistent of power reahionship that involves the significant extent, power, rulers, or authority.* Sistem politik dinggap sebagai pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan”.

Sistem politik ialah suatu cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya

dan mengatur hubungan antara negara dengan negara atau dengan rakyatnya, atau dengan secara singkat dapat dikatakan bahwa : sistem politik ialah tata cara mengatur negara. (Sukarna, 1981 : 8)

Dapat diartikan bahwa pengertian sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

d. Ciri-ciri sistem politik

Menurut Almond dalam Haryanto (1982:13) ada 4 ciri sistem politik :

1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembagian kerja yang teratur.
2. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat dibandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi itu tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
3. Semua struktur politik biar bagaimanapun juga dispesialisasikan baik pada masyarakat yang primitif maupun yang modern untuk melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu sistem politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.
4. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan secara rasional. Secara rasional tidak ada struktur kebudayaan yang semuanya primitif. Melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsur modern dan tradisional.

David Easton dalam Arifin Rahman (1998 : 23) berpendapat bahwa ciri-ciri sistem politik, yaitu : 1) adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus

batas-batas pengaruhnya. 2) adanya input dan output dalam sistem yang tercermin adanya keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input). 3) adanya jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem. 4) adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan pula tingkatan efisiensinya.

Irish dan Protho dalam Sukarna (1981 : 20) : ciri-ciri sistem politik adalah: 1) Kehidupan politik dipisahkan sedikit-dikitnya secara analitis dari kegiatan dan sistem-sistem yang lain. 2) dipandang dari politik sebagai suatu sistem, menyadari bahwa tiada satupun bagian dapat bekerja penuh tanpa melihat jalanya kegiatan secara keseluruhan. 3) kegiatan sistem politik secara keseluruhannya dapat dipahami dalam arti kegiatan lingkungan daerah di luar sistem politik dianggap sebagai bagian dari suatu kebudayaan yang sangat luas yang dipengaruhi dan mempengaruhinya.

e. Dinamika Politik

Kata "Dinamika" berarti keadaan yang berubah-ubah yang menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus aktifitas dan sistem sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan (Hollander, 1978: 151). Dinamika tersebut menunjuk pada perubahan yang terjadi karena desakan kebutuhan internal dan eksternal. Dinamika kelompok misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Slamet Santoso (2004:25) bahwa dinamika dipahami sebagai tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lainnya secara timbal balik, dia mengartikannya sebagai adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok

yang lain secara timbal balik dan antara anggota kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (groups spirit) terus menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.

Dinamika sebagai pemberian pengaruh terhadap desain organisasi dan karakteristik lingkungan. (Hellriegel, 1989 : 356-357)

Dari uraian diatas dapat diambil suatu makna bahwa dinamika politik adalah gerak yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Dinamika tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat.

F. Ideologi Partai

Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos, yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu eidos yang artinya bentuk. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (R. Soejadi, 1994: 47).

Dalam pemetaan Ideologi politik di Indonesia, kita bisa menelusurinya dengan memahami berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Dari kalangan politisi, Soekarno (1964) memetakan ideologi partai politik ke dalam Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), dimana kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Dari kalangan akademisi, Feith dan Castles (1970) menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk ‘Sungai Budaya’ tahun 1950-an, yaitu, Nasionalisme Radikal

(PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), Sosialisme Demokratis (PNI-Masyumi) dan Komunisme (PKI) (Nurjaman, 2006: 136).

Formulasi Herbert Feith (1970) mengungkap lima kutub aliran, yaitu, Islam, Nasionalisme Radikal, Sosialisme, Komunisme, dan Tradisionalisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Budha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai. Feith melihat kelima aliran itu saling terkait (*cross-cutting*). Nasionalisme radikal dengan representasi PNI terkait dengan NU; Islam dengan representasi Masyumi bersama NU; Tradisionalisme Jawa dengan representasi Partindo terkait PNI dan NU; sedangkan sosialisme demokrat dengan representasi PSI terkait Masyumi dan PNI. Kecuali aliran komunisme yang diwakili PKI yang menjadi kutub terpisah sendiri. Pola penggolongan Feith tersebut tampaknya mendobrak kesemerawutan pandangan ideologi yang kaku.

Dalam realitasnya, kehadiran partai-partai politik di negeri kita baik pada Pemilu 1999 maupun 2004 selalu mencerminkan kedua aliran tersebut yaitu Partai Nasionalis dan Partai Agama, dalam hal ini Islam. Karena itu lalu ada penyebutan

3. Partai Politik

Menurut Carl Friedrich dalam Inu Kencana (2003 : 103) bahwa : "*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the farther objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*". Maksudnya sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir dengan stabil, dengan tujuan menjaga atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.

Richard M dalam Arifin Rahman (1998: 90) berpendapat "partai politik merupakan alat yang pernah didesain oleh manusia dan paling ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Karena demikian pentingnya keberadaan

partai politik, sampai munculnya pandangan dalam masyarakat politisi modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada di luar air”.

Miriam Budiarjo, 1998: 16 berpendapat ”Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan partai”.

Partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintah secara sah, engan tujuan bahwa dalam pemilu memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah/ subservatif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu melalui revolusi atau coup d’etat. (Sukarna, 1981: 89)

Partai Politik menurut Nishihara, Partai politik khususnya partai golkar ialah partai yang ditopang oleh sistem dan mekanisme politik yang dirancang oleh pemerintah, dimana militer menjadi bagian dari system dan mekanisme politik tersebut dan bagian dari strategi partai.

Partai politik merupakan alat utama dan alat yang dinamis dalam pemerintahan. Partai diartikan sebagai organisasi manusia yang menjadi penggendeng antara rakyat dn badan-badan pemerintah, yang pada akhirnya melaksanakan atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagaimana diwujudkan dalm hukum dan kebijakan.(S. Pamudji, 1983: 20)

Menurut Inu Kencana. S (2003 : 104) ”Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) Negara”. Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat sebagai politik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang dalam membicarakan partai politik

sebagai pengendali kekuasaan. Partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara demokrasi modern, dan tidak ada seorang ahlipun dapat membantahnya, karena partai politik sangat diperlukan kehadirannya bagi negara-negara yang berdaulat. Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat eksistensi partai politik merupakan prasyarat yang baik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, juga terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat.

Fungsi Partai Politik

Menurut Mirriam Budiarjo (1982: 164) dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :

a) Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat modern yang begitu luas. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

Perumusan kepentingan dijadikan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan pemerintah melalui partai politik. Partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan memyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik

sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*"clearing house of idealis"*).

b) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik *sosialisai politik* diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umunya berlaku dalam masyarakat di mana berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa.

Sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataan.

c) Partai politik sebagai sarana recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

d) Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflic management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotaan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi malahan dipertajam.

Gejala-gejala ini di beberapa negara baru telah menimbulkan kekecewaan terhadap sistem kepartaian ini dengan membawa bermacam-macam akibat: ada negara dimana partai-partai dibubarkan (Pakistan tahun 1958, sekalipun kemudian terpaksa dihidupkan kembali) ada negara di mana hanya dibenarkan adanya satu

partai tunggal (beberapa negara Afrika) ada negara dimana ruang gerak partai-partai dibatasi.

1) Klasifikasi Partai

Klasifikasi partai dalam Mirriam Budiarjo (1991 : 166) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu prgram yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa adalah masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung dibawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing terutama pada saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saingan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

a) Sistem partai-tunggal

Sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*condictio in terminis*) sebab menurut pandangan ini suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu unsur. Namun demikian istilah ini telah tersebar luas dikalangan masyarakat dan sarjana. Istilah ini dipakai untuk partai yang enar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi.

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika (Ghana di masa Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan *non-kompetitif* Oleh karena partai-partai yang ada harus menerima

pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan di negara-negara baru, pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikuatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini dibiarkan, besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan.

b) Sistem Dwi Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan adanya dua partai dan adanya beberapa partai tetapi dengan peranan yang dominan dari dua partai. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum) dengan demikian jelaslah dimana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persidangan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada ditengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung (Floating Vote).

Sistem dwi partai pernah disebut "*a convenient system for contented people*" dan memang kenyataannya bahwa sistem dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (Social Homogeneity), konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok (Political Consensus) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah (Historical Continuity). Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (sistem distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja.

c) Sistem Multi-Partai

Sistem ini sering disebut dengan sistem banyak partai. Negara yang menganut banyak partai biasanya terjadi pada masyarakat yang mempunyai

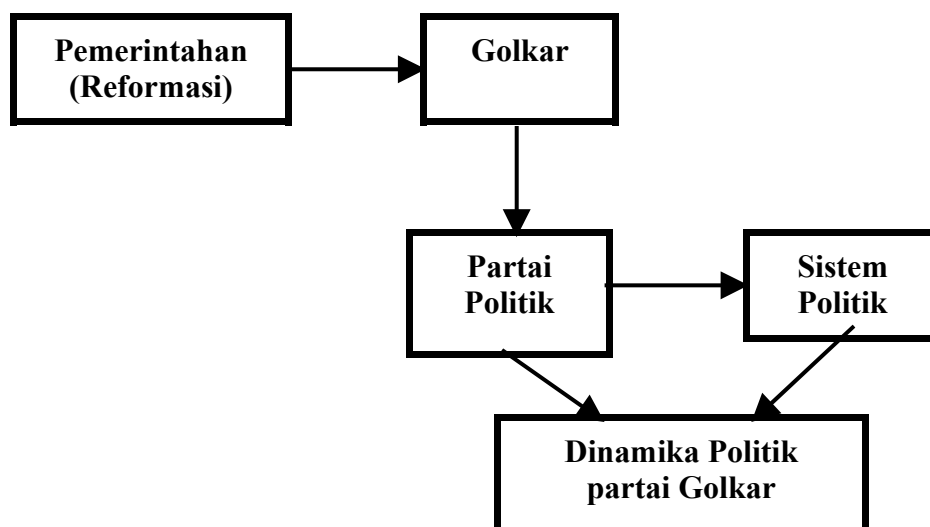
keanekaragaman/kemajemukan. Sifat kemejemukan yang terdapat pada suatu masyarakat terdiri dari ras, agama, lapisan sosial, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan suatu ikatan primordial yang kuat. Primordialisme tersebut akan memunculkan organisasi-organisasi sosial politik yang berdasar pada primordial.

Sistem multi-partai, kalau digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang tidak cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (Proportional Representatif) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multi-partai. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1989 Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multi-partai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya.

B. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan otoriter Soeharto melahirkan suatu masa yang disebut dengan Orde Reformasi. Orde reformasi ini menimbulkan beberapa perubahan yang signifikan. Pada masa reformasi ini terjadi banyak sekali perubahan di berbagai bidang kehidupan, baik politik, sosial, budaya dan ekonomi. Di era awal masa reformasi banyak tuntutan atau desakan

yang diarahkan untuk diadakan pembaruan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Dalam bidang politik ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai politik. Atas dasar itu, pemerintah yang kemudian dipimpin oleh Presiden B.J Habibie dan parlemen mengeluarkan UU No. 2/1999 tentang partai politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi lebih kuat.

Melihat kondisi yang demikian, maka Golkar yang pada awalnya merupakan suatu organisasi massa terbesar pada masa Orde Baru mempercepat pembaruan internal. Pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merestorasi pandangan politiknya agar sesuai dengan keinginan rakyat dalam dinamika politik yang baru. Dan tepat pada tanggal 7 Maret 1999 Golkar secara resmi dideklarasikan sebagai partai politik dengan nama Partai Golkar.

Perubahan sistem politik juga ditekankan di tubuh Partai Golkar. Perombakan ini dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama masa reformasi. Partai Golkar membuat perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik partai. Dengan mengedepankan asas demokrasi yang pada masa Orde Baru mustahil dilaksanakan. Keinginan Partai Golkar untuk melakukan pembaruan sekaligus kesinambungan. Pembaruan merupakan pendekatan baru yang dianggap paling sesuai dan efektif untuk mengejar tujuan dasar partai. Pembaruan harus dilakukan secara struktural, kelembagaan hingga pada level budaya organisasi. Sedangkan kesinambungan berarti peneguhan terhadap nilai substansial. Hal ini menimbulkan dinamika politik Partai Golkar yang terjadi pada masa awal reformasi sampai dengan kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2004 yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “**DINAMIKA POLITIK PARTAI GOLKAR 1998-2004**”, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis mencari sumber tertulis di perpustakaan. Adapun perpustakaan yang dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah:

- a. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- e. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- f. Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- g. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.
- h. Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
- i. Perpustakaan St. Ignatius Yogyakarta.
- j. Perpustakaan Akbar Tandjung Institute Jakarta
- k. Kantor DPP Golkar Jakarta
- l. Digital Library Cornell University

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan Juli 2009, sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini yaitu pada bulan Juli 2010.

25

B. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977 : 16).

Sedangkan menurut Helius Sjamsudin (1996 : 6), yang dimaksud dengan metode adalah suatu prosedur teknik atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh suatu ilmu (*sains*), seni atau disiplin ilmu yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, mendiskripsikan dan memaparkan dinamika politik Partai Golkar pada masa 1998-2004. Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah. Dengan metode sejarah penulis mencoba merekonstruksi kembali suatu peristiwa

di masa lampau sehingga dapat menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hadari Nawawi (1998 : 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Menurut Louis Gottschalk yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 44) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61), yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan ceritera sejarah yang dapat dipercaya.

Nugroho Notosusanto (1971) mengatakan bahwa “metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan penggalian-penggalian masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya, metode ini merupakan proses merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga menjadi kisah yang nyata”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sehingga dapat memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisa secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam

bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut, agar dapat dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995 : 94) kata "data" merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *datum* (bahasa latin) yang berarti pemberitaan.

Menurut Dudung Abdurrachman (1999 : 30) data sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996 : 61) sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (*past actuality*). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (*raw materials*) sejarah yang mencakup segala macam *evidensi* (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan). (Helius Syamsuddin, 1994: 73)

Dalam usaha untuk mengunpulkan data, penulis menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Louis Gottshalck (1986: 35) mengemukakan bahwa sumber tertulis primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahnya. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang dikisahnya.

Sumadi Suryabrata (1998: 17) berpendapat bahwa penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian yang dituliskan pada waktu peristiwa terjadi. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari aslinya. Diantara kedua sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data.

Sumber primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ilmiah ini adalah berupa koran dan majalah yang terbit pada tahun 1997 sampai 2000-an , diantaranya adalah *Koran Jawa Pos, Kompas, Merdeka, Gatra, Media Indonesia, Suara Karya, Bisnis Indonesia, Tempo, Solopos, dll*. Sumber primer yang berasal dari koran dan majalah berisi atau berkaitan dengan Politik Partai Golkar.

Adapun sumber sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa buku-buku *literature*, maupun artikel-artikel yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain : . *The Golkar Way* karangan Akbar Tandjung, *Menggugat Kemandirian Golkar* karangan Andreas Pandiangan, *Dari Beringin Ke Beringin* karangan Umar Ibn Alkhatab, *Geger Golkar dan konspirasi politik kekuasaan* karangan La Ode Ida, *Pembubaran Partai Golkar ?* karangan Todung Mulya Lubis, *Pers Memihak Golkar* karangan Yohanes Krisnawan. dll

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian historis merupakan salah satu langkah yang penting. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan melalui dua macam, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara membaca data yang berasal dari arsip, buku, majalah, surat kabar

yang terbit pada masa itu atau yang terbit kemudian. Bahan ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti.

Teknik studi pustaka yang digunakan dalam penelitian adalah dengan sistem kartu atau menggunakan katalog. Sistem kartu ini mencatat beberapa sumber tertentu mengenai pengarang, judul buku, subyek, dan isinya, karena ini perlu mengingat beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat didalam subyek yang dibahasnya, sehingga buku dan artikel yang dimasukan dalam katalog di bawah salah satu di antara kata-kata kunci.

Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa buku-buku literatur dan ensiklopedia yang berkaitan dengan tema dinamika politik Partai Golkar 1998-2004 yang tersimpan di beberapa perpustakaan diantaranya adalah Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Iganatius Yogyakarta.
- 2) Membaca, mencatat, meminjam dan memfotokopi buku-buku literatur karangan sejarawan yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan berdasarkan periodisasi waktu atau secara kronologis.
- 3) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari perpustakaan untuk digunakan dalam penyusunan karya ilmiah.

2. Wawancara

Menurut Koentjoroningrat (1986: 129) "metode wawancara atau metode intervie, mencakup cara yang dipergunakan untuk tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu"

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, namun wawancara merupakan suatu proses penumpulan data untuk suatu penelitian (Moh. Natsir, 1988 : 234).

Adapun maksud dari wawancara adalah untuk mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motif, tuntutan kepedulian, dan lain-lain. Suatu wawancara mempunyai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia di dalam masyarakat, sehingga untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan maka diadakan pemilihan personal yang diwawancarai, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya (Koentjaraningrat, 1986: 138)

Untuk memperoleh data yang dapat dipertnggungjawabkan, maka diadakan pemilihan personal yang diwawancarai, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki pengetahuan tentang Partai Golkar. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara terbuka di mana wawancaranya dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan informan dapat menjawab dengan panjang lebar.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah.

Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian.

Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai data yang diinginkan sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan fakta-fakta itu kemudian di seleksi, diklarifikasi dan ditafsirkan, baru kemudian merangkaikan fakta-fakta tersebut untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode historis, maka ada empat tahap yang harus

dipenuhi. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani "*heurishein*" yang artinya memperoleh. Sidi Gazalba (1981 :15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak dan sumber tidak tertulis serta sumber yang relevan dengan penelitian ini (Nugroho Notosusanto, 1978 : 36). Sedangkan Helius Sjamsudin (1994 : 99) "heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah". Dengan demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah.

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis primer, berupa surat kabar, dan majalah; maupun sumber sekunder berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan, dan diantaranya: Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Jurusan FKIP, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, dan Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Muhamadiyah Surakarta, Perpustakaan Ignatius Yogyakarta.

b. Kritik

Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah langkah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan sumber. Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. (Dudung Abdurrahman, 1999: 58).

a. Kritik Sumber ekstern

Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi segi-segi fisik sumber data tertulis dan sumber data lisan. Jika sumber tersebut merupakan sumber tertulis maka harus diteliti kertasnya, tintanya, ejaanya, gaya tulisanya, bahasanya, kalimatnya, ungkapanya, kata-katanya, hurufnya an segi penampilan luarnya yang lain. Untuk sumber lisan harus diketahui usia dari nara sumber ketika diwawancarai, dan peranan nara sumber dalam Partai Golkar.

b. Kritik Sumber Intern

Kritik intern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek dalam arti sumber data sejarah. Kritik intern dilakukan untuk mendapatkan sumber dan data sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat diketahui bagaimana isi sumber data sejarah dan relevansiny dengan masalah yang diteliti. Kritik intern sumber data tertulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis, sumber data, kecenderungan politik, permasalahan sama. Kemudian isi dan pernyataan dari sumber data tertulis maupun lisan tersebut dibandingkan dengan sumber-sumber data yang lainnya. Hasil dari kritik sumber data sejarah adalah fakta sejarah.

c. Interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah.

d. Historiografi

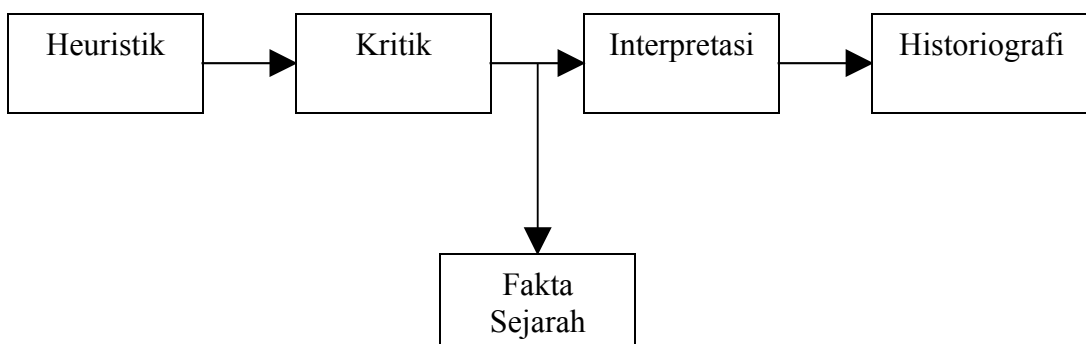
Historiografi adalah menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah atau hasil penafsiran atas fakta-fakta sejarah itu dilukiskan menjadi suatu kisah yang selaras dan logis. Pada tahap ini dituntut kemahiran dalam menuliskan kisah sejarah dengan bahasa yang baik. Dalam menyusun asi penelitian sejarah hendaknya disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. (Nugroho Notosusanto, 1978 : 42).

Fakta sejarah belum dapat disajikan dalam bentuk hisoriografi jika belum dieksplanasi. Eksplanasi adalah uraian penjelasan melalui pernyataan tentang hubungan antara fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah yang lain. Eksplanasi yang memuaskan tergantung dari bagaimana diformulasikannya pertanyaan terhadap fenomena yang dikaji. Eksplanasi yang memuaskan jua tergantung dari terdapatnya hubungan sebab-sebab tertentu dengan akibat.

Eksplanasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan yang lebih analitia dan menuntut jawaban analitis kritis pula. Pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) seputar dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004. hal tersebut dilaksanakan agar diperoleh gambaran tentang peristiwa masa lampau yang sesungguhnya, analitis ilmiah, dan jelas. Dengan demikian pertanyaan tidak hanya diformulasikan dengan pertanyaan deskriptif dan jawaban yang deskriptif faktual saja, seperti apa (*what*), dimana (*where*), kapan (*when*), dan siapa (*Who*).

Fakta sejarah yang suah dieksplanasi kemudian disajikan melalui kegiatan historiografi. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Dinamika Politik Partai Gokar 1998-2004.

Dari uraian di atas dapat dibuat bagan prosedur penelitian sebagai berikut :



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Strategi Politik Partai Golkar Pasca Munaslub 1998

Orde Baru mengembangkan suatu organisasi kekuasaan yang sentralistik. Dengan berpedoman terhadap arti penting stabilitas dan pertumbuhan, maka direkonstruksikanlah suatu susunan sosial politik baru yang diasumsikan mampu berjalan stabil. Arti lain stabilitas itu adalah kemampuan kekuasaan untuk mengontrolnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah content kekuasaan yang ditawarkan kepada publik. Disini, publik mengunyah kenikmatan tertib sosial dan stabilitas ekonomi dalam wujud rendahnya harga-harga kebutuhan pokok (politik kebutuhan pokok). Sebagai imbalan, kekuasaan menuntut adanya ketaatan sosial yang kuat (Alfian, 2002 : 3).

Pada masa Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) adalah organisasi yang dibentuk ulang guna menjadi alat mobilisasi dukungan dan alat legitimasi sosial politik. Dengan konsepsi bahwa Golongan Karya merupakan kekuatan yang akan dijadikan sebagai lokomotif demokrasi, pemerintah Orde Baru berhasil

menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971. Pemilihan Umum itu dilaksanakan setelah semua perangkat hukum dan Undang-Undang dipersiapkan dan seluruh pimpinan parpol dan tokoh-tokoh masyarakat sepakat dengan konsensus nasional yang pada dasarnya mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Hasil Pemilu 1971 membuat banyak orang terkejut. Sebagai pendatang baru ternyata Golkar dengan mudah dapat mengalahkan partai-partai besar yang telah mapan seperti PNI dan NU. Secara menyeluruh hasil pemilu 1971 menunjukkan Golkar memperoleh 236 kursi (62,80%), NU 58 kursi (16,11%), Parmusi 24 kursi (6,6%), PSII 10 kursi (2,77%), Perti 2 kursi (0,55%), PNI 20 kursi (5,55%), Parkindo 7 Kursi (1,94%) dan Partai Katholik 3 kursi (0,83%) (Patmono, 2001:53).

Menyangkut kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 ini, ada beberapa interpretasi. Sebagaimana besar orang setuju bahwa peran ABRI dan birokrasi sangat instrumental dalam kemenangan Golkar. Bahkan Ali Murtopo mengakui hal ini (Suryadinata, 1992: 47).

“Beberapa kalangan berpandangan bahwa kemenangan Golongan Karya terjadi karena beberapa faktor berikut : tersedianya dana, dukungan pejabat, tentara ABRI, pembentukan Korpri, lembaga-lembaga, semua ini tentu saja memberikan sumbangan pada kemenangan Golongan Karya.”

ABRI dan Golkar lebih banyak bersifat *simbiosis mutualisme* (saling menguntungkan). Hal ini dapat dipahami karena ABRI-lah yang membidani kelahiran Golkar. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. ABRI sebagai mesin intimidasi dan represi, sedangkan Golkar merupakan mesin politik untuk memobilisasi massa dan mendapatkan legitimasi politik melalui pemilihan umum (Yulianto, 2002: 309).

Nishihara dalam kajiannya pada kemenangan Golkar pada pemilu 1971 menyatakan bahwa kemampuan Golkar meraih kursi mayoritas di parlemen adalah sesuatu yang diluar perkiraan. Demikian pula tingginya tingkat partisipasi pemilih (94%) tidak dapat dilepaskan dari peran militer dan merupakan bagian dari strategi pemenangan Golkar. Dengan demikian, menurut Nishihara, kemenangan Golkar pada pemilu 1971 tersebut adalah karena Golkar ditopang

oleh sistem dan mekanisme politik yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru, dimana militer menjadi bagian dari sistem dan mekanisme politik tersebut

Pada pemilu Orde Baru, superioritas Golkar tidak terbendung lagi. Golkar memenangkan seluruh pemilu Orde Baru dengan meraup suara yang fantastis. Kehadiran Golkar menurut David Reeve dilandasi semangat kolektivisme dan prinsip kekeluargaan yang tidak mengedepankan ideologi politik aliran. Hadirnya golongan fungsional yang merupakan cikal bakal Golkar karenanya diterimanya secara baik oleh Soekarno maupun kalangan militer. Pada masa Orde Baru, Golkar kemudian menjadi kekuatan politik utama dengan tetap mengembangkan ide prinsip kekeluargaan. Dengan dasar falsafah kolektivisme dan prinsip kekeluargaan inilah Golkar mampu terus berkiprah dan dapat dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang plural (Reeve, 1985: 30).

Sistem kepartaian Golkar sangat kuat disebut sebagai sistem kepartaian yang hegemonik (*hegemonic party system*). Dengan pengertian bahwa sistem kepartaian yang tidak membolehkan adanya kompetisi formal dalam kekuasaan. Partai politik lain dibolehkan hidup, tetapi menjadi kelas kedua, atau partai politik yang cuma terdaftar, tetapi marginal peranya. Sistem kepartaian Orde Baru adalah hasil sejumlah faktor yang dirancang oleh pemerintah, yaitu kreasi dari aparat keamanan yang represif dalam mengatur kemapanan dan merawat stabilitas dan tatanan politik negara; proses depolitisasi massa guna memberi kesempatan secara komplet pada kebijakan ekonomi dan pembangunan; pengebirian dan restrukturasi parpol; penciptaan *electoral laws*, dan *elecrtoral process* yang menjamin bahwa partai yang disponsori pemerintah atau tentara yakni Golkar, selalu menang dalam pemilu (Gaffar, 1992: 37-38).

Pengunduran diri Soeharto dari tampuk kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan B.J Habibie sebagai presiden baru merupakan *blessing in disguise* bagi Golkar. Dengan pengertian bahwa pergantian rezim tidak disertai pergantian partai yang memerintah. Oleh karena itu, transisi politik lebih dapat dikelola oleh Golkar yang merupakan kekuatan politik terbesar dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Perubahan politik yang berlangsung demikian ini sangat menguntungkan bagi Golkar, sebab transisi demokrasi ini tidak mengganti

secara keseluruhan struktur pemerintahan yang ada, tetapi perubahan dilakukan secara gradual. Lengsernya Soeharto ini kemudian menimbulkan sejumlah tantangan, akan tetapi hal ini sekaligus juga menjadi peluang bagi Golkar dalam menapaki kehidupan politik ke depan, yakni kehidupan politik yang demokratis. Golkar dapat menyesuaikan dengan suhu demokratis persaingan antar partai politik (Tandjung, 2008 : 72).

Krisis ekonomi dan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Golkar mempercepat pembaruan politik nasional. Dalam kondisi yang demikian, tidak ada pilihan bagi Golkar kecuali mempercepat pembaruan internal. Situasi politik internal Golkar setelah berhentinya Soeharto antara lain ditandai oleh mengemukanya pro-kontra atas sikap dan kebijakan politik Harmoko yang telah secara terbuka mendesak agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Manuver politik Ketua Umum DPP Golkar Harmoko tersebut memicu polarisasi internal Golkar, setidaknya antara kubu yang menghendaki Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan kubu yang menentangnya. Polarisasi tersebut setidaknya tergambar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, yang diselenggarakan di Jakarta, 3 dan 4 Juni 1998. Rapimnas tersebut dihadiri seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, sebagai respons Golkar dalam menghadapi dinamika politik setelah berhentinya Soeharto.

Pada awalnya forum yang digelar itu berupa rapat koordinasi. Akan tetapi, seluruh peserta mengusulkan perubahan statusnya menjadi rapim, agar bisa mengambil keputusan yang bersifat mengikat. Dari fungsionaris DPP hadir Harmoko, Abdul Gafur, Waskito Reksosoedirdjo, Agung Laksono, Ary Mardjono, dan Moestahid Asari. Ada dua pengurus yang tidak hadir, yakni Siti Hardijanti Rukmana (Ketua DPP) dan Bambang Trihatmodjo (Bendahara). Pada hari kedua suasana semakin panas. Masing-masing DPD I mengajukan pandangan, terutama sekitar perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), penghapusan lembaga Dewan Pembina, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), dan pengunduran diri Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar (Gatra, 6 Juni 1998).

Delapan DPD I (Jambi, Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah) meminta Harmoko mundur sebelum Munas. Bahkan, ada DPD yang menuntutnya mundur saat itu juga yakni sejumlah pengurus Golkar Kota Madya Jakarta Selatan. Kecaman tersebut membuahkan suatu gerakan yang disebut de-Harmokoisasi atau Asal Bukan Harmoko (ABH). (Nugroho, 1999 : 103). Mereka menganggap Harmoko kurang tanggap dalam merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat. Menanggapi berbagai desakan mundur itu, Harmoko dalam jumpa pers usai rapim mengungkapkan bahwa ia tunduk pada aturan yang berlaku. Harmoko juga mengatakan bahwa ia menegaskan tak bersedia dicalonkan kembali sebagai ketua umum dalam Munaslub nanti (Kompas, 4 Juni 1998).

Pada akhir Rapimnas menetapkan keputusan bahwa dalam rangka melaksanakan konsolidasi organisasi untuk memperkuat jati diri, idealisme serta mewujudkan cita-cita perjuangan Golkar, maka perlu dilakukan Reformasi Golkar, dengan : (a) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-lambatnya bulan juli 1998; (b) Musda Tingkat I dan tingkat II diselenggarakan segera setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa; (c) agenda dalam Musyawarah Luar Biasa sesuai kewenangan diadakan perubahan AD/ART dan segala sesuatu yang menyangkut reformasi Golkar (Tandjung, 2008: 95).

Dari butir-butir rekomendasi terlihat bahwa Golkar berupaya merespons perubahan politik yang terjadi secara adaptif. Golkar memilih menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan politik eksternalnya, dan tidak bersifat konfrontatif terhadap aspirasi reformasi. Sikap yang dipilih Golkar tersebut merupakan modal bagi Golkar agar tetap eksis dan berperan di tengah-tengah perubahan politik. Sementara secara internal, tampak adanya kesadaran untuk melakukan "reformasi Golkar" yang dilakukan secara mendasar. Untuk itulah diperlukan Munaslub.

Sesudah tercapai kesepakatan untuk mempercepat Munaslub, muncul masalah baru yang menyangkut seseorang yang akan menjadi penyelenggara. Saat Soeharto masih berkuasa, hal seperti ini biasanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Mulai dari kepanitiaan sampai nama calon anggota pengurus. Ketika Soeharto

lengser, gesekan antar kubu yang selama ini dapat diredam mulai tak terkendali. Penyusunan kepanitiaan jadi alot dan berliku-liku. Akhirnya perebutan kepanitiaan dirasakan oleh masing-masing kelompok sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis karena memegang posisi panitia akan memiliki keuntungan strategis untuk menjalankan skenario Munaslub (Alfian, 2004 : 36)

Alotnya masalah ini, akhirnya DPP Golkar membentuk Tim Tujuh untuk menyusun kepanitiaan. Tim Tujuh ini diketuai oleh Abdul Gafur, dengan anggota terdiri atas Agung Laksono, Moestahid Astari, Waskito Reksosodirdjo, Ary Mardjono, Aulia Rachman, dan Bambang Trihatmodjo. Dalam rapat pleno DPP Golkar pada 15 juni 1998 dilakukan voting penentuan Ketua Munaslub, yang akhirnya dimenangkan oleh Waskito Reksosodirdjo (23 suara), mengalahkan Agung Laksono (19 suara) (Nugroho, 1999 : 119).

Ada banyak faksi di Golkar. Kubu Habibie, Akbar Tandjung, Ginandjar, Harmoko. Kubu Edi Sudradjat, Try Sutrisno, Indra Bambang Utoyo. Kubu Sudharmono, Rachmat Witoelar, Sarwono Kusuma Atmaja, Siswono Yudhohusodo. Dalam pertarungan selanjutnya, kubu Edi Sudradjat dan Sudharmono memiliki kepentingan menggusur kelompok Habibie, Akbar Tandjung dan Harmoko. Dari kubu Habibie, Harmoko muncul nama-nama calon untuk diusung di Munaslub adalah Akbar Tandjung, Fahmi Idris dan Agung Laksono. (Alfian, 2004 : 40).

Pertarungan sebenarnya mulai terjadi di kalangan elite Golkar dalam arena Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 juli 1998 di Hotel Indonesia, Jakarta. Suasana pada Munaslub itu terasa fantastis, karena pemilihan Ketua Umum DPP pun dilakukan secara voting, suatu tradisi yang tak pernah dilakukan Golkar. Selama berkuasa pada orde baru, Soeharto selaku Dewan Pembina yang menjadi pusat kekuasaan (Suryadinata, 1992). Semua faksi tersebut berkepentingan dengan masa depan Golkar karena hal itu menyangkut masa depan politik mereka sendiri. Dalam konteks ini, persaingan antar faksi melahirkan *regrouping* dalam kerangka pencapaian tujuan politiknya untuk menguasai Golkar, sehingga faksi-faksi di atas mengerucut menjadi dua aliansi besar, yakni kaum reformis dan loyalis Soeharto (Nugroho,

1999 : 153). Kaum reformis ialah kelompok yang menghendaki pembaharuan dari segala bentuk pemerintah Orde Baru. Kelompok yang dimotori Habibie ini menuding kelompok Edi Sudradjat sebagai loyalis Soeharto yang menekankan bahwa pimpinan Golkar tumbuh berjenjang dari bawah ke atas dan tidak sebaliknya dari atas ke bawah. Kelompok loyalis Soeharto ialah kelompok yang dioperatori oleh Edi Sudradjat yang didukung oleh kubu Cendana (Soeharto) dikarenakan kekecewaan Soeharto terhadap kubu Habibie (Gatra, 11 Juli 1998). juga karena hasil pembicaraan Soeharto dan Try Sutrisno. Hal ini ditunjukkan ketika Try Sutrisno *sowan* ke Soeharto saat ia terpilih menjadi ketua Pepabri. Pada kesempatan itu, Soeharto sendiri yang meminta Edi Sudradjat memimpin Golkar. Edi Sudradjat dinilai figur yang bisa membenahi Golkar (Nugroho, 1999: 124). Dua aliansi ini dikenal juga dengan sebutan kelompok Putih (Faksi Harmoko, faksi Habibie, faksi Ginandjar, dan faksi Marzuki Darusman) dan Kelompok Merah yang dinisbatkan kepada kelompok Edi Sudradjat. Para delegasi terkritisasi dalam dua kubu, faksi Akbar dan faksi Edi. Lobi-lobi dan manuver politik, serta debat panas yang mengalir dinamis, membuktikan bahwa Golkar mampu melepas budaya politik paternal yang sudah lapuk (Gatra, 18 Juli 1998)

Di dalam arena Munaslub, agenda pemandangan umum DPD-DPD I. Sebuah forum yang dapat menunjukkan kemana suara DPD akan diarahkan, apakah ke kubu Edi Sudradjat atau ke kubu Akbar Tandjung. Dalam pemandangan umum di hari pertama oleh 17 DPD, 7 DPD yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, Bali, NTT dan NTB secara jelas mendukung Edi Sudradjat. Sedangkan Akbar Tandjung hanya mendapat lima suara DPD yakni DI Aceh, Irian Jaya, Kaltim, Riau dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sisanya belum jelas akan diarahkan kepada siapa dukungannya. Inilah pertama kalinya Golkar memilih pemimpinnya dari bawah. Ini juga berarti demokrasi mulai berkembang di tubuh Golkar (Nugroho, 1999 : 146).

Setelah mengetahui posisinya yang kalah, maka Akbar Tandjung mulai tampil *all out* jika ingin memenangkan pertarungan. Peta dukungan yang kian detik berubah ini, berkaitan dengan klaim politis dan manuver 17 Jendral yang dimotori Hariyoto PS. Pesaing lama jaman Munas 1993. Saat itu klaim di atas

kertas menyebutkan, dari 27 DPD, 21 DPD yang diketahui menyatakan untuk mendukung Edi Sudradjat. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan posisi Akbar Tandjung. Kubu Akbar Tandjung sedikit demi sedikit kembali normal setelah keesokan harinya, ketika agenda pemandangan umum dilanjutkan, dukungan terhadap Akbar bertambah. Skor dukungan berbalik menjadi 13-10 untuk keunggulan Akbar Tandjung. 4 DPD I yakni Bengkulu, Jambi, Yogyakarta dan Timor Timur yang belum jelas akan kemana suaranya. Suasana ketidakpastian bagaimana akhir dari pertarungan untuk memenangkan pertarungan ini, Akbar Tandjung harus mendapat dukungan satu suara DPD lagi. Sedangkan kubu Edi membutuhkan 4 suara DPD yang tersisa (Gatra, 6 Juni 1998).

Saat situasi menegangkan itu, Akbar mengeluarkan pernyataan-pernyataan sejuk khas gaya politiknya. Akomodatif, responsif, dan menganggap lawan sebagai aset untuk membesarkan organisasi ini. Jika ia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar maka ia akan memikirkan untuk mundur dari jabatan Mensesneg. Janji besar yang dipertaruhkan Akbar adalah *bargaining* ke pemilik suara. Akbar juga melontarkan pernyataan sebagai upaya mencairkan suasana dengan melansir serangkaian pernyataan sejuk. Menurutnya, pernyataan di arena Munaslub ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan proses demokrasi. Akbar Tandjung juga mengatakan bahwa kalau Edi Sudradjat menang maka ia akan sepenuhnya mendukung (Kompas, 11 Juli 1998)

Masing-masing kubu mengklaim diri memiliki 15 dukungan. Pemilihan dilakukan dua tahap. Tahap pertama untuk mendapatkan calon ketua umum dengan dukungan minimal lima suara DPD. Dalam putaran pertama, Akbar Tandjung memperoleh 15 suara, Edi Sudradjat 11 suara dan Sultan Hamengkubuwono X, satu suara. Dari hasil ini, Akbar Tandjung dan Edi Sudradjat dipastikan menjadi calon karena suara keduanya sudah memenuhi persyaratan pencalonan yakni minimal 5 suara DPD. Pada tahap pemilihan yang mendebarkan dan terkesan panas itu, akhirnya Akbar Tandjung terpilih dengan 17 suara. Berbeda dengan Edi Sudradjat yang hanya didukung oleh 10 suara. Setelah pemilihan, Edi Sudradjat memberi ucapan selamat kepada Akbar Tandjung.

Akbarpun beranjak ke panggung dan mengacungkan kedua tanganya sebagai simbol Golkar dalam kampanye pemilu. Menanggapi kemenangan Akbar Tandjung ini, Edi Sudradjat mengatakan adalah sikap demokrat jika pendukung calon yang kalah kemudian menyatakan dukungan kepada calon yang memenangkan pertarungan (Kompas, 12 Juli 1998).

Kemenangan Akbar ini lebih karena disebabkan oleh kecerdikan para pendukung Akbar Tandjung memanfaatkan situasi politik saat itu. Kubu Akbar mencitrakan diri sebagai kelompok reformis dan Edi Sudradjat terlanjur teropini sebagai loyalis Soeharto. Isu inilah yang terus berkembang dalam arena Munaslub. Terpilihnya Akbar Tandjung juga satu terobosan bagi usaha aktivis Golkar yang merangkak dari bawah. Akbar mempelopori kehadiran dan berkiprah di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sampai terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Dengan karier seperti itu, sosok Akbar Tandjung dianggap sebagai simbol kemenangan jalur G (Golkar). Karena ia lahir dan besar di lingkungan Golkar (Ridwan, 2003).

Berdasarkan hasil-hasil keputusan Munaslub, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru; merombak struktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan; memutuskan jalur-jalur politik yang menopangnya (Jalur A dan B); serta mengondisikan pelaksanaan musdamusda DPD Golkar di seluruh Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah strategis tersebut, Partai Golkar berupaya menciptakan kesisteman baru yang adaptif terhadap perubahan.

Paradigma Baru Partai Golkar

Munaslub Golkar 1998 memberikan ruang wacana bagi berkembangnya konsep paradigma baru sebagai respons Golkar yang mendasar terhadap perkembangan politik yang terjadi di era reformasi. Konsep paradigma baru tersebut pertama kali dilontarkan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visimisinya sebagai kandidat ketua umum DPP Golkar dalam Munaslub tersebut. Penegasan paradigma baru diulangi kembali oleh Ketua Umum Akbar Tandjung

dalam deklarasi Partai Golkar 7 Maret 1999 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. (Kompas, 8 Maret 1999).

Menurut Akbar Tandjung,

”Munaslub 1998 adalah momentum penting dalam perjalanan Golkar. Golkar dengan sadar melakukan awal reformasi dirinya, untuk kembali ke jati diri, visi, dan misi perjuangannya seperti yang yang dipatrikan pada saat kelahirannya. Munaslub telah mengembalikan Golkar yang selama Orde Baru telah terperosok hanya sekadar menjadi mesin politik penguasa, menjadi alat pengumpul suara dalam pemilu, dan sekadar alat legitimasi penguasa yang otoriter”

Paradigma baru ini muncul pada saat yang sangat tepat, ketika para kader Golkar mengalami berbagai kesulitan dan keterbatasan dalam menjawab secara tepat arus reformasi demokrasi yang berjalan. Salah satu implikasi dari demokratisasi ini adalah runtuhnya paradigma lama yang lekat dengan otoritarianisme dan semangat antidemokrasi sebagaimana banyak terlihat dalam praktik Orde Baru. Paradigma baru Golkar juga memiliki signifikansi penting sebagai hasil penyesuaian dan kontekstualisasi nilai-nilai dasar Golkar dalam lingkungan baru era reformasi.

Dalam kajian historis tentang akar ideologi dan budaya Golkar seperti yang dilakukan oleh sejarawan David Reeve, misalnya terlihat adanya benang merah antara pembentukan ideologi Golkar dan konsep kolektivisme Ki Hajar Dewantara. Konsep ini dianggap sesuai dengan filsafah kehidupan dan spiritualitas masyarakat Jawa yang dicirikan oleh idealitas kesatuan hidup dan kesatuan *kawulo-gusti*. Dalam konteks kenegaraan, perwujudan konsep negara integralistik menekankan kesatuan rakyat dengan para pemimpinnya (Reeve, 1985 : 67). Konsep ini menekankan supremasi penguasa atas rakyat, dimana rakyat harus mengedepankan sikap pasrah dan patuh pada titah penguasa.

Golkar pasca-Munaslub adalah Golkar dengan misi dan visi baru (DPP Partai Golkar, 1998 & Salim Hs, 1999). Misi Golkar baru terkait dengan kedudukan dan fungsinya sebagai partai politik antara lain :

Pertama, mempertegas sikap untuk menyerap, memadukan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat public.

Kedua, melakukan rekrutmen kader yang berkualitas dan mendapatkan dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga permusyawaratan/perwakilan dalam pemerintahan.

Ketiga, melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara melalui komunikasi dan sosialisasi politik. (Kompas, 1999)

Dengan visi baru dengan nama Partai Golkar. Dengan visi baru yang bersemangat reformasi ini, Golkar sama sekali bukan hanya sekedar ingin menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi, juga bukan sekedar ingin merealisasikan pemutusan hubungan dengan masa lalu (*disconnection*), melainkan karena Golkar bertekad ingin menyertai serta mengarahkan jalannya reformasi sehingga berlangsung dalam koridor konstitusi dan tidak salah (*disorientation*). Golkar memandang bahwa reformasi di segala bidang itu harus merupakan proses evaluasi yang dipercepat, yakni secara gradual, terarah dan konstitusional.

Untuk mengawali itu semua Golkar terlebih dahulu melakukan reformasi atas dirinya sendiri. Reformasi internal ini tampak dengan nyata ketika Golkar menyelenggarakan Munaslub 1998. Dalam konteks dan perspektif ini Munaslub 1998 berlangsung dalam semangat reformasi dan pembaruan. Serangkaian langkah-langkah reformis internal yang dilakukan Golkar untuk menunjukan Golkar dengan semangat baru dan Golkar dengan Paradigma Baru.

Pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah Golkar, Ketua Umum dipilih dengan mekanisme demokratis yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) melalui pemungutan suara (*voting*) secara langsung. Mekanisme yang baru pertama kali dilakukan dalam sepanjang sejarah Golkar. Ini kemudian diikuti secara konsisten dan taat azas dalam forum-forum Musyawarah Daerah Kecamatan serta desa-desa se-Indonesia. Mekanisme ini menandai berkembangnya budaya politik baru dalam dalam Golkar. Mekanisme pemilihan yang sangat demokratis, rasional dan transparan ini telah menandai fase baru bagi Partai Golkar; yakni Golkar yang lebih Demokratis yang diyakini akan memberikan andil yang besar dan signifikan terhadap perkembangan kehidupan politik Nasional.

Kedua, dilakukannya perubahan AD/ART secara drastic, antara lain, sebutan “Orde Baru” dalam pembukaan AD/ART dihapuskan karena dirasakan tidak relevan lagi, meski semangat pembaruan yang menjadi ciri utama Golkar tetap dipertahankan dan diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan ini harus dipandang sebagai manifestasi tekad Golkar untuk memutus hubungan dengan system kekuasaan lama. Dengan demikian Golkar akan dapat lebih jernih dan Obyektif dalam melakukan koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam berbagai bidang, utamanya politik, ekonomi dan hokum. Ini semua dilakukan Golkar bukan dalam rangka menghujat masa lalu, melainkan lebih diarahkan kepada perspektif masa depan. Sebagai kekuatan pembaharu dan modern Golkar tidak menginginkan bangsa ini terbelenggu masa lalu, melainkan harus berorientasi masa depan.

Ketiga, dihapusnya institusi yang mengakibatkan ketidakmandirian organisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama eksistensi lembaga Dewan Pembina yang terlalu dominant itu telah menjadi begitu eksesif. Otoritas Dewan Pembina yang dalam paradigma lama bukan hanya dapat membatalkan kebijakan/keputusan Dewan Pimpinan Pusat, melainkan juga dapat membekukan sementara kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian untuk mengakomodasikan dan mendayagunakan potensi para pini sepuh, sesepuh dan senior yang selama ini telah menunjukan darma baktinya kepada Golkar, maka dibentuk lembaga Penasihat dimana pengalaman dan kearifan mereka sangat diperlukan oleh organisasi. Namun, kedudukan, fungsi dan kewenanganya tidak sama dengan yang dulu. Penasihat memiliki fungsi memberikan saran dan masukan bagi Golkar, baik diminta maupun tidak diminta.

Keempat, diakhirinya pelembagaan secara formal apa yang dalam perspektif dan paradigma lama dikenal dengan “kepemimpinan Tiga Jalur : Keluarga Besar Golkar Jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi atau pemerintah) dan Jalur G (Golkar itu sendiri). Implikasi dari perubahan yang mengandung konsekuensi penghapusan pelembagaan formal jalur-jalur tersebut cukup signifikan, yakni menjadikan Golkar mandiri dan bertumpu pada kekuatan sendiri.

Kelima, sesuai dengan semangat yang berkembang dalam Munaslub 1998, Golkar telah mengambil langkah-langkah untuk pemulihan kredibilitas organisasi dengan melakukan tindakan terhadap anggota yang berindikasi KKN.

Visi Baru Partai Golkar

Munaslub 1998 telah mengantarkan Golkar baru dengan visi baru, yaitu Partai Golkar yang (1) terbuka, (2) mandiri, (3) demokratis, (4) moderat, (5) solid, (6) mengakar pada responsif). Keenam hal ini yang membedakan secara signifikan Golkar lama dengan Partai Golkar (DPP Partai Golkar, 1998)

Pertama, Partai Golkar adalah partai yang terbuka atau inklusif bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status social ekonomi. Keterbukaan Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan posisi politik. Keterbukaan Golkar merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. Partai Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini Partai Golkar senantiasa siap bersaing secara sehat. Hal ini sangat berbeda pada kaderisasi masa Orde Baru, dimana pengkaderan Golkar hanya berkuat kepada mereka yang duduk di pemerintahan. Yang berbuat banyak dan yang berpengaruh kepada jalanya seluruh proses politik Golkar adalah pilar-pilar utama keluarga besar Golkar. Di masa Orde Baru tidak ada proses penyegaran kader yang dilakukan dari jenjang kader Golkar yang sampai tingkat desa atau kelurahan (Pandiagan, 1996: 205).

Kedua, dikatakan mandiri karena Partai Golkar adalah merupakan organisasi kekuatan social politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun. Partai Golkar adalah partai yang independent, baik secara

struktural maupun secara cultural. Secara struktural, Partai Golkar tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina dan system tiga jalur. Demikian juga halnya musyawarah-musyawarah Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah, keputusan-keputusan yang diambil selalu bersifat *bottom up* yang mencerminkan secara penuh kedaulatan di tangan anggota. Terlihat dengan jelas bahwa Golkar pada masa Orde Baru menjadi instrumen yang sangat mudah dimanfaatkan oleh militer untuk kepentingan mereka. Kepentingan militer untuk terus mempertahankan posisinya masih terkait erat dengan tujuan dasar pembentukan Golkar oleh militer, yakni untuk meraih dukungan serta pengakuan dan peranya dalam pemerintahan. Kenyataan ini menghalangi Golkar untuk dapat berproses mengembangkan diri menjadi sebuah organisasi yang mandiri (Boileu, 1983: 96).

Pada masa Orde Baru, birokrasi telah banyak diselewengkan peran dan fungsinya menjadi "pelayan kekuasaan" daripada sebagai "pelayan masyarakat". Keterlibatan birokrasi untuk mendukung kemenangan Golkar antara lain ditandai dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 tahun 1969 yang kemudian dikenal sebagai "permen 12". Melalui "permen 12" ini PNS dilarang terlibat aktif dalam partai politik. Keputusan itu menggiring seluruh pegawai negeri pada satu kenyataan bahwa mereka tidak mungkin menjadi anggota partai politik. Hanya ada dua pilihan bagi pegawai negeri : menjadi pendukung Golkar atau keluar dari pemerintahan. Kebijakan seperti ini tentunya akan memihak pada Golkar dan menyapu habis partai-partai politik. Konsekuensi dari regulasi ini menempatkan unsur PNS yang jumlahnya begitu besar menjadi salah satu faktor penentu bagi kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu Orde Baru (Patmono, 2001: 32), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah PNS di Indonesia 1974-1993

Golongan	Jumlah PNS 1974	Jumlah PNS 1984	Jumlah PNS 1987	Jumlah PNS 1993
I	882.258	754.397	687.449	611.228
II	681.704	1.789.672	2.265.357	2.660.925
III	70.292	234.192	419.682	689.809
IV	6.479	15.972	25.061	35.371

Jumlah	1.640.733	2.785.646	3.403.408	3.950.126
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Affan gaffar 2004: 240

Pada akhirnya, pasca Orde Baru Golkar menegaskan sikapnya untuk turut mendukung kebijakan B.J Habibie tentang netralitas birokrasi. Pertimbangan tersebut antara lain didasari kehendak untuk membuktikan bahwa Golkar komitmen kuat sebagai pendukung demokrasi. Sikap keras untuk mempertahankan posisi PNS akan menyulitkan Golkar untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian kekuatan demokrasi. Selain membuat Golkar tidak pernah dewasa karena tidak mampu melepaskan ketergantungan pada kekuatan eksternal. Bagi Golkar sendiri, netralitas birokrasi ini sangat penting artinya dalam mewujudkan Golkar sebagai partai politik yang modern dan mandiri (Jawa Pos, 27 Januari 1999 & Tandjung, 2008: 160).

Ketiga, dikatakan demokratis karena Partai Golkar, baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Pengambilan keputusan sudah berasal dari *down top*. Jejak langkah demokrasi Partai Golkar secara internal dapat disaksikan terutama selama dan setelah Munaslub 1998. komitmen pada demokrasi ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka Partai Golkar akan Survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Pada masa Orde Baru berlaku kultur pengambilan keputusan politik yang *top down* dan absolut yang mendominasi dalam Golkar. Oleh karena itu, dalam Partai Golkar dikembangkan kultur dan budaya politik yang lebih demokratis (www.Suarakarya-online.com).

Keempat, dikatakan moderat, karena Partai Golkar adalah organisasi kekuatan social politik yang selalu mengambil posisi tengah dan moderasi. Kecenderungan pada sikap ekstrem tidak akan pernah menjadi sikap Golkar. Sebagai partai moderat, Partai Golkar akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Dengan demikian, dengan sebagai partai yang moderat, Partai Golkar senantiasa berada pada posisi tengah (*median*

position) dan menjadi kekuatan perantara dan penengah (*mediating and moderating force*) diantara semua potensi bangsa.

Kelima, dikatakan solid, karena Partai Golkar dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis. Untuk itu, maka konsolidasi organisasi telah menjadi agenda yang sangat penting. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa /kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan peranya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi modern.

Keenam, dikatakan mengakar dan responsive, karena di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (*merit system*). Partai yang mengakar telah dibuktikan dan akan terus ditingkatkan lagi dalam sepanjang perjalanan sejarahnya selama lebih dari tiga dasawarsa sebagai kekuatan social politik terbesar. Pengakaran Partai Golkar dibuktikan dengan mengembangkan program-program yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dalam konteks Partai Golkar sebagai partai yang responsive, yakni senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan dan harapan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya sehingga menjadi keputusan politik yang bersifat public yang menguntungkan seluruh rakyat.

Keenam prinsip tersebut menunjukan adanya upaya Partai Golkar ke arah pembaharuan diri dalam menyesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi yang kian berkembang. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dasar tersebut pada hakikatnya merupakan prinsip umum yang dikembangkan dan dianut oleh partai modern dan demokratis. Keenam prinsip itu jugalah yang kemudian memberikan muatan “paradigma baru” Golkar baru tersebut. Kini Partai Golkar bukan lagi menjadi mesin pengumpul suara dari pemerintah (*the rulers party*) sebagaimana dalam paradigma lama.

Secara internal, berbagai sosialisasi dan internalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri para anggota Golkar di tengah banyaknya tekanan masyarakat, selain juga merupakan dorongan bagi para anggota Golkar. Untuk memperbaharui diri, baik itu menyangkut cara berpikir maupun sikap politiknya. Dengan internalisasi tersebut, para kader Golkar juga diingatkan

bahwa di masa transisi telah terjadi banyak perubahan mendasar yang perlu direspons secara berbeda dengan masa sebelumnya.

Meski berbagai sosialisasi telah dilakukan dengan gencar untuk terwujudnya paradigma baru Partai Golkar, beberapa kendala masih banyak dijumpai. Terutama telah bercokolnya sekian lama “kultur lama” di mana para tokoh Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menikmati berbagai *privilege* selama masa Orde Baru, yang menyebabkan keinginan melakukan perubahan nilai-nilai ini tidak begitu saja mudah diterima. Pada saat yang sama tantangan dari luar yang kian nyata terutama terkait dengan tuntutan reformasi dan demokrasi yang harus direspons Partai Golkar secara tepat telah menjadikan perubahan nilai-nilai dan paradigma baru menjadi sesuatu yang niscaya. Beberapa perubahan mendasar paradigma dalam Partai Golkar dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Paradigma Lama dan Paradigma Baru Partai Golkar

Paradigma Lama	Paradigma Baru	Keterangan
Dewan Pembina memiliki kewenangan mutlak.	Institusi Dewan Pembina dihapuskan	Dewan Pembina melalui Munaslub Golkar 1998 diganti menjadi Penasehat yang hanya berfungsi memberikan saran-saran.
Pengambilan keputusan bersifat top-down dengan melibatkan tiga jalur, ABRI-Birokrasi-Golkar	Pengambilan keputusan secara demokratis dan bersifat bottom-up. Tiga jalur A-B-G dihapuskan karena menghalangi mekanisme pengambilan keputusan demokratis.	DPD I dan DPD II diberi hak penuh dalam pengambilan keputusan pada Munas dan kebijakan strategis lain.

Pola rekrutmen kepengurusan dipengaruhi oleh kedekatan politik dan nepotisme	Standarisasi yang lebih jelas dalam rekrutmen kepengurusan Golkar dengan mengedepankan <i>merit system</i> (dedikasi, prestasi, loyalitas, dan kecakapan)	Sejak Munaslub pemilihan pimpinan berdasarkan suara dari DPD-DPD
Golkar tidak otonom, terutama dari militer dan birokrasi	Golkar bersifat independen dan mandiri. Otonomi diwujudkan dengan penghapusan tiga jalur ABG.	Golkar di era reformasi menempatlan dukungan rakyat sebagai sumber utama kekuatan.
Pola kepemimpinan bersifat sentralistik. Posisi Ketua Umum lebih sebagai pelaksana dari putusan Ketua dewan Pembina.	Kepemimpinan Golkar bersifat kolegial.	Ketua Umum memiliki posisi yang menentukan, namun tetap berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat demokratis kolegial.

Sumber : Tandjung, 2008 : 233

B. Konflik Internal dan Eksternal Partai Golkar

Munaslub Golkar 1998 telah berhasil melahirkan apa yang disebut sebagai Paradigma Baru Partai Golkar. Begitu pula Pemilu 1999 telah menghantarkan Partai Golkar pada posisi yang istimewa. Tetapi kedua keberhasilan tersebut telah menyisakan kemelut di tingkat internal tubuh Partai Golkar. Konflik internal Partai Golkar dapat dibagi ke dalam tiga tahap oleh karena proses perkembangannya berjalan berdasarkan ritme terjadinya gejolak dan peristiwa politik di tanah air. Ketiga tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam usaha konsolidasi Partai Golkar di dalam menghadapi suasana politik yang baru. Yaitu, pertama, tahap setelah kejatuhan Orde Baru hingga menjelang pelaksanaan

Munaslub di Jakarta (Mei 1998-Juli 1998). Kedua, setelah Munaslub sampai dengan pemilu 1999 (Agustus 1998-Juni 1999). Dan terakhir, setelah pemilu hingga akhir tahun 2002 (Juli 1999-Desember 2002).

A. Konflik Internal Partai Golkar

Konflik Internal Partai Golkar (Mei 1998-Juli 1998)

Segera setelah Soeharto meletakkan jabatan, terjadi kekacauan di tubuh Golkar berkaitan dengan siapa yang akan memegang kontrol terhadap mesin politik itu. Sepanjang 32 tahun, Soeharto otomatis menjadi satu-satunya pemegang kontrol dan merupakan sumber dan sentral dari kekuasaan di tubuh Golkar. Kendati organisasi politik ini memiliki seorang ketua umum yang notabene memiliki kewenangan menentukan langkah-langkah politiknya, tetap saja tidak memiliki kekuasaan riil jika berhadapan dengan Soeharto yang kekuasaannya dilembagakan dalam apa yang disebut sebagai Dewan Pembina (DP). Dalam konteks ini dapat dimengerti jika seorang pemimpin politik yang mengepalai Golkar sangat tunduk terhadap preferensi politik ketua DP (Suryadinata, 1992 : 97).

Keberadaan DP yang demikian kuat dengan sendirinya telah memperlemah kemampuan pemimpin Golkar untuk mencari alternative-alternatif lain sekaligus memastikan inisiatif yang memiliki misi ke depan. Kemampuan kritis kader Golkar dengan sendirinya lumpuh jika berhadapan dengan tembok besar yang bernama DP itu, terutama dilihat dari tipisnya kesempatan bagi kader Golkar untuk mengambil bagian dalam proses politik misalnya proses penentuan personal siapa yang akan menjadi presiden. (Imawan, 1993 : 175). Kondisi ini membuat Golkar berada pada posisi yang serba sulit. Golkar akhirnya lebih merupakan piranti pengumpul suara daripada sebagai organisasi politik yang bertindak sebagai partai yang sesungguhnya (Tolleng, 1979: 81). Golkar tidak

lebih dari sebuah onderdil dari sebuah korporasi Negara yang dikuasai oleh oligarki kekasaan (Kompas, 7 Juni 2001).

Kondisi sulit inilah yang dialami oleh Harmoko, Menteri Penerangan tiga periode (1983-1997) dan orang sipil pertama yang dipercaya menjadi Ketua Umum Golkar (Kompas, 10 Maret 2002). Ia tidak dapat menampik ketika Soeharto menyatakan keinginannya untuk terus memimpin bangsa ini. Ketidakmampuan menampik keinginan Soeharto telah menjadi budaya yang khas dalam tubuh Golkar (Amal, 1993: 56-57), dan semakin mendapatkan format *patentnya* sejak organisasi politik itu dipimpin Harmoko yang dikenal pintar menempatkan posisinya sebagai seorang kepercayaan Soeharto. Budaya politik yang susah menampik dan tunduk yang nyaris tanpa *reserve* ini, membuat para kader Golkar menangkap pernyataan itu sebagai isyarat untuk tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden pada tahun 1998 (Jawa Pos, 21 Agustus 1997). Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) Maret 1998, Soeharto dikukuhkan kembali secara aklamasi sebagai presiden.

Pengunduran diri Soeharto secara otomatis membuat Golkar seperti kehilangan tali pengeang. Unsure-unsur di dalam Golkar yang selama ini kelihatan solid tampak berserakan. Sebuah Kino besar dalam Golkar, MKGR, tepat seminggu setelah Soeharto menyatakan mundur, yaitu pada tanggal 27 Mei 1998, menyatakan keluar dari Golkar dan akan menjadi partai politik sendiri. Pernyataan keluar dari MKGR ini, kendati juga menyisakan perdebatan di kalangan MKGR sendiri, memperlihatkan bagaimana fragmentasi yang terjadi di dalam Golkar tidak bisa lagi ditutup-tutupi (Gatra, 6 Juni 1998).

Kehidupan politik di tubuh Golkar terbuka pasca turunnya Soeharto, banyak konflik yang terlihat. Faksi-faksi yang ada di dalam tubuh Golkar, yang selama ini menjadi sel tidur mulai tampak ke permukaan. Setidaknya terdapat enam faksi yang muncul dan saling bersaing untuk memperebut kekuasaan (*power struggle*) di dalam Golkar. Yaitu, pertama, faksi Harmoko yang basisnya adalah organisasi kemasyarakatan tradisional yang selama ini menjadi penyokong Golkar. Kedua, faksi Keluarga ABRI (Pepabri dan FKPPi) yang dimotori Edi Sudradjat. Ketiga Faksi Akbar Tandjung yang mengandalkan alumni Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI). Keempat adalah faksi Ginandjar Kartasasmita yang pendukung utamanya adalah pemodal dan pebisnis. Kelima, faksi avonturir politik yang diwakili Marzuki Darusman. Dan terakhir adalah faksi Habibie yang di dalamnya terdapat kelompok ICMI dan kekuatan Islam lainnya (Alkhatab, 2009).

Semua faksi tentu berkepentingan dengan masa depan Golkar karena hal itu menyangkut masa depan politik mereka sendiri. Dalam konteks ini, persaingan antarfaksi melahirkan *regrouping* dalam kerangka pencapaian tujuan politiknya untuk menguasai Golkar sehingga faksi-faksi diatas mengutub menjadi dua aliansi besar, yakni kaum reformis dan loyalis Soeharto (Nugroho, 1999: 153). Dua aliansi ini dikenal juga dengan sebutan Kelompok putih, yang beranggotakan faksi Harmoko, faksi Habibie, faksi Ginandjar dan faksi Marzuki Darusman. Kelompok ini berhadapan dengan kelompok Edi Sudradjat.

Seiring dengan kejatuhan Soeharto maka kecaman segera dialamatkan kepada Harmoko karena ia dianggap paling bertanggung jawab dengan kejatuhan Soeharto. Kecaman terhadap Harmoko itu berisikan tuntutan pengunduran dirinya dan membuahkan gerakan yang disebut de-Harmokoisasi atau Asal Bukan Harmoko (ABH) dan orang-orangnya di tubuh Golkar (Nugroho, 1999: 103). Akan tetapi karena ekologi politik Golkar ketika itu masih dikuasai oleh Harmoko membuat persaingan antarfaksi di dalam Munaslub itu dimenangkan oleh faksi Harmoko yang beraliansi dengan sayap reformis lainnya di tubuh Golkar. Hal ini dilihat dari naiknya Akbar Tandjung untuk menggantikan Harmoko dengan menyisihkan Edi Sudradjat dari kelompok merah (Nugroho, 1999: 104).

Konflik yang terjadi sebelum dan selama Munaslub berlangsung merupakan awal dari serangkaian konflik berikutnya. Sebab, kendati Akbar Tandjung telah berupaya mengakomodasi semua faksi yang bersaing di dalam kepengurusan Golkar yang baru, ternyata upaya tersebut tidak mendatangkan unifikasi final antarfaksi di tubuh Golkar karena kelompok yang kalah dalam Munaslub mengambil jalan memisahkan diri dengan Golkar. Mereka mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar di bawah Akbar Tandjung dan berencana membuat saluran politik sendiri atau hijrah ke partai politik yang lain.

Konflik Internal Partai Golkar (Agustus 1998-Juni 1999)

Niat kelompok yang kalah dalam Munaslub untuk membuat partai politik sendiri mulai direalisasikan pada Agustus 1998. Mereka membentuk sebuah organisasi yang bernama Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang di prakarsai oleh Siswono Yudhohusodo, Djoko Sujatmiko, Sarwono Kusumaatmaja, David Napitupulu, Haryadi Dharmawan, Totto S. Pradjamanggala, Udju S. Dinata dan Said Aqiel Siradj (Nugroho, 1999: 188). Organisasi ini bertendensi menjadi organisasi massa yang diperuntukan sebagai partner yang kritis terhadap pemerintahan B.J Habibie dan Golkar. Dalam konsepsi yang dikembangkan oleh organisasi ini, terdapat keinginan untuk menjadikan organisasi ini sebagai kelompok penekan (Nugroho, 1999: 189). GKPB menegaskan dirinya hanya mendukung partai yang tidak mencalonkan B.J Habibie sebagai presiden dan mendukung pergantian pemerintahan B.J Habibie secara konstitusional melalui mekanisme SU MPR (Jawa Pos, 18 Desember 1999).

Pada bulan Agustus, tepatnya 6 Agustus 1998, sebuah organisasi baru muncul dengan salah satu tujuannya adalah menggembosi Golkar di dalam pemilu yang direncanakan Presiden B.J Habibie pada bulan Juni 1999, yaitu Barisan Nasional (Barnas). Sebagian besar motor organisasi ini adalah para pensiunan yang pernah menduduki jabatan penting di tubuh militer di masa Orde Baru dan terutama adalah mereka yang tersingkir dari Munaslub Golkar. Diantara motor Barnas dari kalangan purnawirawan ABRI adalah Edi Sudradjat, Ali Sadikin, Kemal Idris, Harsudiono Hartas, Theo Syafii, Kharis Suhud, Sholihin GP dan Syamsir Siregar. Keberadaan organisasi ini, sebagaimana diakui oleh Kemal Idris, pemimpin utama organisasi itu, dinyatakan sebagai kelompok oposisi terbuka yang dibentuk untuk menggugat sistem Orde baru yang dinilainya masih dijalankan oleh kepemimpinan B.J Habibie dan organ politiknya bernama Golkar Barnas juga menegaskan bahwa hasil Munaslub Golkar adalah berkat rekayasa kekuatan birokrasi dengan jajaran militer aktif sehingga tidak sejalan dengan

semangat reformasi. Dengan kata lain, langkah reformasi di tubuh Golkar melalui Munaslub dianggap palsu (Nugroho, 1999: 185-189).

Dua bulan setelah Munaslub, perseteruan antara pihak yang kalah dengan pihak yang menang dalam Munaslub kembali terjadi. Kali ini pihak yang kalah memberikan nota keberatannya terhadap kepemimpinan Akbar Tandjung yang dianggapnya tidak mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan B.J Habibie. Dalam nota keberatan yang bertanggalkan 7 September 1998 itu, mereka juga mempertanyakan mengapa Golkar tidak melakukan pergantian unsure pimpinan MPR/DPR dari Golkar, yaitu Harmoko dan Abdul Gafur yang mereka nilai sebagai individu-individu yang negative dan tidak cakap dalam politik (Nugroho, 1999: 194).

Setelah pengiriman nota keberatan itu, mereka kemudian menuntut Golkar untuk meminta maaf kepada masyarakat atas sepak terjangnya di masa lalu. Terhadap tuntutan terakhir ini, Akbar Tandjung mengatakan bahwa tidak proporsional bila Golkar meminta maaf kepada masyarakat atas krisis dan segala akibatnya yang terjadi dewasa ini. Mereka menegaskan bahwa kesalahan di masa lalu adalah kesalahan semua pihak yang tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang terpusat di bawah kepemimpinan perorangan yang kuat (Kompas, 21 Oktober 1998).

Tidak memadainya hasil langkah-langkah kritis mereka terhadap Golkar baru, faksi Edi Sudradjat kemudian mempersoalkan jabatan politik yang disandang Akbar Tandjung sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menurut mereka memperlihatkan bahwa Golkar belum berubah. Dengan jabatan itu, mereka mensinyalir Akbar Tandjung akan menjadikan birokrasi sebagai mesin pemilu Golkar. Bahkan pada saat menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR muncul gerakan yang dipimpin Haryono Isman dengan agenda mempersolkan perubahan status Golkar menjadi partai politik. Mereka menuduh Akbar Tandjung mengkhianati khittah pendirian Golkar pada tahaun 1964 yang merupakan antitesa terhadap partai politik. Bersamaan dengan itu, DPP Golkar mendepak (recall) anggota faksi Edi Sudradjat dari posisi mereka di DPR/MPR dengan alasan penyegaran (Nugroho, 1999: 195).

Semua langkah yang ditempuh faksi Edi Sudradjat untuk merestorasi Golkar tidak mendatangkan hasil yang memadai bahkan menemui jalan buntu. Karenanya, bentuk perlawanan mereka dikonkretkan dengan mengumumkan rencana pembentukan partai politik sendiri untuk merealisasikan cita-cita politik mereka. Sebulan kemudian, pada tanggal 15 Januari 1999, faksi Edi Sudrajat mendeklarasikan kendaraan politik mereka yang baru, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang berasaskan Pancasila dengan menonjolkan peningkatan demokrasi, kemerdekaan individual, dan persaudaraan Indonesia (Kompas, 16 Januari 1999). Pembentukan partai baru ini dengan sendirinya menandai faksi Edi Sudradjat sebagai *outsider* Golkar.

Setelah faksi Edi Sudradjat menjadi *outsider* Golkar bukan berarti konflik di tubuh Golkar dengan sendirinya mereda. Konflik justru datang dari dalam tubuh Golkar itu sendiri, yaitu munculnya penolakan Adi sasono, salah seorang Ketua DPP Golkar yang sekaligus Menteri Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (Menkop & UKM), menjadi juru kampanye Golkar untuk pemilu 1999. Penolakan Adi Sasono dilatarbelakangi oleh alasan bahwa dirinya menjadi menteri bukan karena Golkar. Menurutnya, ia tidak mau menjadi corong Golkar. Prinsipnya ia ingin memisahkan antara kegiatan politik praktis dengan kegiatan pemerintahan dan kerakyatan (Gatra, 23 Januari 1999).

Kendati demikian, ada kecurigaan di kalangan Golkar bahwa penolakan Adi Sasono itu merupakan batu loncatan baginya untuk mendirikan partai politik baru demi menghadapi pemilu 1999. Pendirian partai politik baru itu akan didahului oleh pendeklarasian sebuah organisasi masyarakat yang bernama Persatuan Daulat Rakyat yang disokongnya lewat program ekonominya. Tidak lama berselang, ormas itu ditahbiskan menjadi partai politik menjelang akhir bulan April 1999 dan dipimpin oleh orang dekat Adi sasono, Latif Burhan, seorang pengurus teras ICMI Jawa Timur. Partai Politik yang bernama Partai Daulat Rakyat (PDR) itu dirancang untuk menyukseskan pencalonan B.J Habibie sebagai presiden (Gatra, 17 April 1999).

Dalam kondisi yang sarat konflik ini, Golkar kemudian memproklamirkan dirinya sebagai partai politik di bulan Maret 1999 untuk menghadapi pemilu pada

bulan Juni 1999 (Gatra, 13 Maret 1999). Dalam usaha mempersiapkan dirinya menghadapi pemilu, Partai Golkar kembali menghadapi konflik internal yang cukup mengganggu, yaitu munculnya desakan agar B.J Habibie segera menjelaskan posisinya dalam tubuh PDR pimpinan Latif Burhan yang berencana mencalonkan B.J Habibie sebagai presiden untuk periode 1999-2004. Desakan itu dilontarkan oleh seteru politik B.J Habibie di dalam Partai Golkar, yaitu Marzuki Darusman (Gatra, 8 Mei 1999). Desakan Marzuki Darusman ini berkaitan dengan spekulasi bahwa PDR merupakan sayap dukungan B.J Habibie dan Adi Sasono di luar Partai Golkar (Gatra, 17 April 1999).

Kendati dijejali banyak konflik internal, baik sebelum memproklamirkan dirinya sebagai partai maupun sesudahnya, Partai Golkar berhasil dalam pemilu bulan Juni 1999 dengan menduduki tempat kedua setelah PDI-P dengan meraup 24 Juta suara yang setara dengan 120 kursi di DPR. Dengan elegan Akbar Tandjung menyampaikan ucapan selamat kepada Megawati Soekarnoputri atas kemenangan PDI-P itu (Kompas, 17 Juli 1999).

Konflik Internal Partai Golkar (Juli 1999-Desember 2002)

Konflik berikutnya di tubuh Partai Golkar berkenaan dengan persiapan Partai Golkar memenangkan pemilihan presiden keempat. Pemicunya adalah pernyataan Marzuki Darusman yang menegaskan bahwa pencalonan B.J Habibie oleh Partai Golkar bukanlah pencalonan final melainkan suatu pencalonan optimal. Ini berarti bahwa pencalonan B.J Habibie memiliki kemungkinan untuk dibatalkan sambil melihat perkembangan politik baru (Kompas, 17 Juli 1999). Pernyataan ini dinilai mengoreksi keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) I bulan Mei 1999 yang menegaskan bahwa B.J Habibie merupakan satu-satunya calon presiden dari Partai Golkar dengan disertai lima calon wakil presiden (Gatra, 28 Agustus 1999). Padahal, sebelum pemilu dilaksanakan, Marzuki Darusman justru mengatakan bahwa B.J Habibie merupakan orang yang paling layak dicalonkan. Alasannya adalah bahwa B.J Habibie memiliki banyak dukungan dari Partai yang memiliki afiliasi kepada kelompok Islam, khususnya Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) (Kompas, 15 Februari 1999). Pernyataan lain dari Marzuki Darusman yang dianggap menyudutkan B.J Habibie adalah soal kekalahan Partai Golkar dari PDI-P yang menurutnya disebabkan oleh pencalonan B.J Habibie sebagai presiden oleh Partai Golkar (Kompas, 19 Mei 1999).

Pernyataan-pernyataan tersebut segera saja menyulut kekusaran di kalangan pendukung B.J Habibie yang ada dalam Partai Golkar. Mereka melancarkan protes kepada DPP Partai Golkar agar segera mencopot Marzuki Darusman dari posisinya sebagai salah seorang ketua partai. Mereka, yang terdiri dari 17 DPD dan didukung 18 pengurus DPP ini, yang keseluruhannya berasal dari kaukus Iramasuka, melayangkan tuntutan kepada DPP agar segera melaksanakan Munaslub Partai Golkar yang agenda utamanya adalah mendepak Marzuki Darusman dari kepemimpinan Partai Golkar. Kendati dalam tekanan, pernyataan serupa kembali dilontarkan Marzuki Darusman ketika berlangsung Rapim II Partai Golkar bulan Oktober di Jakarta (Kompas, 12 Oktober 1999).

Perseteruan dua kelompok ini memasuki tahap-tahap kritis ketika B.J Habibie membacakan pertanggungjawaban di depan SU MPR. Kelompok yang anti-Habibie bersikukuh tidak meloloskan pertanggungjawaban Habibie. Kelompok anti-Habibie menolak laporan pertanggungjawaban Habibie karena dianggap memiliki cacat yang tidak dapat ditolong, yakni soal lepasnya propinsi Timor Timur, Keputusan SP3 terhadap Presiden Soeharto, dan pelanggaran Ham berat (Gatra, 23 Oktober 1999). Sementara kelompok yang pro-Habibie bersikeras menggolkan. Kubu pro-Habibie menemui kenyataan yang pahit bahwa laporan pertanggungjawaban Habibie akhirnya tidak diterima oleh MPR (Gatra, 30 Oktober 1999). Penolakan tersebut berbuntut pada aksi pemukulan terhadap Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman oleh sekelompok orang yang tidak dikenal sesuai pemungutan suara pertanggungjawaban. Anggota fraksi Partai Golkar yang berasal dari kubu anti-Habibie yang lain memilih lari ke tempat yang aman. Tindakan penyerangan ini memperlihatkan bahwa friksi di tubuh Partai Golkar bukanlah sebatas adu argumentasi, tetapi sudah mulai menjurus kepada tindakan kekerasan fisik (Jawa Pos, 21 Oktober 1999).

Ditolaknya laporan petanggungjawaban, otomatis peluang Habibie terpilih sebagai presiden keempat menjadi kecil, dan Habibie secara elegan memilih mundur dari pencalonan presiden setelah melihat kenyataan bahwa ia tidak mungkin lagi memenangkan posisi itu (Gatra, 30 Oktober 1999). Kendati sejarah mencatat bahwa kesediaan Habibie untuk mengundurkan diri secara elegan dari perebutan kursi presiden telah menjadikannya sebagai eksemplar sejati dari realisasi nilai-nilai demokrasi, pengunduran diri itu membuat friksi di tubuh Partai Golkar kian mengeras. Kelompok pro-Habibie belum dapat menerima kenyataan pahit itu. Mereka menuduh Akbar Tandjung berkhianat, dan mendesak agar Akbar Tandjung menjelaskan perihal kekalahan Habibie itu (Gatra, 30 Oktober 1999).

Empat bulan SU MPR, konflik kembali muncul berkenaan dengan rencana kubu pro-Habibie membuat partai sempalan yang diberi nama Partai Madani yang memiliki *platform* nasionalisme dan Negara kesatuan. Badan yang akan menangani kelahiran partai ini adalah sayap kelompok pro-Habibie, yaitu para aktivis ICMI yang dipimpin Jimly Asshidiqie bersama sejumlah aktivis politik Iramasuka, seperti Marwah Daud Ibrahim dengan tujuan mengembalikan Presiden B.J Habibie ke panggung politik nasional. Rencana kelompok pro-Habibie ini ditanggapi secara beragam oleh aktivis Partai Golkar. Akbar Tandjung sendiri melihat rencana itu sebagai hal yang biasa dan sudah terbiasa dengan maneuver politik semacam itu (Kompas, 19 Februari 2000). Akhirnya, rencana pembentukan partai baru itu pun mengalami stagnasi.

Setelah konflik yang berkaitan dengan rencana pembuatan partai sempalan itu mereda, boleh dikatakan bahwa sepanjang pertengahan tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2001 konflik internal Partai Golkar tidak banyak yang terekspos ke public. Hal ini disebabkan oleh konsolidasi internal menghadapi derasnya resistensi masyarakat terhadap partai itu bersamaan dengan meledaknya tuntutan pengunduran diri Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan karena diduga terlibat skandal Bulog dan bantuan uang dari Kerajaan Brunei.

Suhu tubuh Partai Golkar kembali memanas ketika Rahardi Ramelan, mantan Kepala Bulog di bawah pemerintahan B.J Habibie, membeberkan pengakuan di depan tim penyidik Kejaksaan Agung bahwa ia telah mengeluarkan

dana sebesar 54,6 Miliar dalam rangka penanggulangan krisis pangan. Dari jumlah tersebut, 40 miliar ia serahkan kepada Akbar Tandjung yang ketika itu menjabat sebagai Mensesneg untuk program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). Dua hari setelah pengakuan ini, Akbar Tandjung mengakui bahwa ia telah menerima cek dari Rahardi Ramelan, dan cek tersebut langsung diserahkan kepada sebuah yayasan untuk membantu mengatasi kerawanan pangan di masyarakat (Kompas, 12 Oktober 2001). Dua minggu berikutnya, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan izin kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa Akbar Tandjung sebagai saksi (Kompas, 26 Oktober 2001).

Cepatnya perkembangan kasus ini membuat kelompok-kelompok di tubuh Partai Golkar menyiapkan scenario penggantian Akbar Tandjung. Terdapat tiga kelompok yang saling bersaing memperebutkan jabatan ketua umum yang akan ditinggalkan Akbar Tandjung jika kasus ini berlanjut ke arah penetapan Akbar Tandjung sebagai tersangka oleh pengadilan, yaitu kelompok Iramasuka, kelompok Ginandjar, dan kelompok Marzuki Darusman (Tempo, 4 November 2001). Di antara kelompok ini, kelompok Iramasukalah yang paling serius menyiapkan scenario penggantian Akbar Tandjung. Mereka yang selama ini antipasti terhadap kepemimpinan Akbar Tandjung segera memanfaatkan momentum ini dengan menggulirkan ide Munaslub. Figure yang dipersiapkan Iramasuka sebagai pengganti Akbar Tandjung adalah Muladi dan Ryaas Rasyid. Pegurus DPD Jawa Tengah ikut bereaksi dengan menegaskan perlunya mengisi jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Akbar Tandjung dijadikan tersangka dalam kasus Bulog (Tempo, 25 November 2001).

Kebutuhan akan reposisi Akbar Tandjung dilihat semakin penting ketika Ketua Umum Partai Golkar itu divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena terbukti melakukan korupsi kendati tidak disertai dengan perintah dari majelis hakim untuk secara langsung menahannya (Kompas, 18 Januari 2002). Sejumlah pengurus DPD dan fungsionaris DPP yang selama ini berseberangan dengan Akbar Tandjung melakukan tekanan agar Partai Golkar segera mereposisi Akbar Tandjung dengan alasan menjaga keselamatan partai itu dalam pemilu 2004 melalui Rapim bulan Februari (Kompas, 23 Januari 2002).

Dalam merespon tuntutan itu Dewan Penasehat Partai Golkar membentuk sebuah badan yang disebut Tim Penyelamat Golkar atau Tim Lima (Kompas, 28 Januari 2002). Salah satu nasehat yang diberikan Tim Lima adalah perlunya seluruh jajaran Partai Golkar menciptakan iklim organisasi yang solid dan kompak, terutama berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Akbar Tandjung (Kompas, 2 Februari 2002).

Tampaknya keberadaan Tim Lima ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok yang menaruh dendam terhadap Akbar Tandjung. Khususnya sayap politik yang pro-Habibie yang masuk dalam tim tersebut, yakni Muladi dan A.A Baramuli. Ide tentang perlunya penyelenggaraan Munas yang dipercepat atau Munaslub merupakan gagasan yang lahir dari Muladi dan A.A Baramuli. Keduanya merupakan sekutu dekat B.J Habibie sebagai presiden. Hanya saja ide Munaslub itu mentok karena Rapim tanggal 7 Februari 2002 justru memberikan dukungan kepada Akbar Tandjung untuk mengikuti proses hukum sampai tuntas tanpa gugatan terhadap posisinya dan mengukuhkan bahwa Munas Partai Golkar akan dilaksanakan sesudah Pemilu 2004 (Koran Tempo, 9 februari 2002).

Bersamaan dengan Rapim 7 Februari 2002, Akbar Tandjung mengumumkan penonaktifan sejumlah pengurus DPP yang dianggap kurang efektif dalam bekerja. Diantaranya yang dinonaktifkan tersebut terdapat nama Muchyar Yara, Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar, yang dikenal kritis terhadap kasus yang menimpa Akbar Tandjung itu. Ia menengarahi bahwa bendahara Partai Golkar telah menyiapkan kuitansi kosong yang diberikan kepada pengurus DPD untuk sewaktu-waktu diisi dengan sejumlah nilai uang sebagai bukti bahwa mereka menerima dana. Dengan strategi ini, Akbar Tandjung dapat berkilah bahwa dana Bulog telah tersalurkan untuk membeli bantuan pangan (Kompas, 8 Februari 2002). Sebelumnya, Muchyar Yara mengusulkan perlunya dilakukan Munaslub untuk meresposisi Akbar Tandjung (Kompas, 12 Januari 2002). Penonaktifan Muchyar Yara dinilai berkaitan dengan sikap kritisnya itu, dan mendorong Marzuki Darusman membelanya dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Muchyar Yara untuk mengisi ruang perbedaan pandangan dalam tubuh Partai Golkar (Kompas, 8 februari 2002).

Sebulan setelah Rapim di Februari (2002), Akbar Tandjung resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung. Para fungsionaris Partai Golkar menanggapi penahanan itu sebagai langkah yang sistematis untuk menzalimi Partai Golkar (Kompas, 8 Maret 2002). Tetapi kelompok yang anti-Akbar Tandjung melihat penahanan itu sebagai langkah maju dan mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme politik dan hukum sekaligus. Menurut mereka, mekanisme politik sangat dibutuhkan untuk memberi tekanan agar mekanisme hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi, bertepatan dengan hari ulang tahun istrinya pada tanggal 3 April 2002, Akbar Tandjung dilepas setelah permohonan penangguhan yang disampaikan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kompas, 4 April 2002). Dengan dilepasnya Akbar Tandjung, semua scenario yang disiapkan lawan politiknya untuk menyingkirkan Akbar Tandjung dari kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk sementara tidak berjalan secara baik, bahkan dapat dikatakan mengalami kegagalan.

Kendati semua scenario penyingkiran Akbar Tandjung tidak berjalan baik, tuntutan terhadap dirinya untuk non-aktif dari ketua umum partai dan kepemimpinan di dewan legislative masih saja dilintarkan oleh faksi-faksi yang bersaing denganya. Sosok yang paling getol adalah Marwah Daud Ibrahim, salah seorang aktivis politik yang paling berpengaruh di tubuh Iramasuka dan salah seorang fungsionaris yang kritis di tubuh DPP Partai Golkar. Ia secara terbuka meminta Akbar Tandjung bersikap *legowo* dan ikhlas untuk mundur dari kepemimpinan Partai dan kepemimpinan di DPR. Terkait dengan kasus Marwah, telah dibentuk tim sanksi. Namun, tim sanksi hanya memberikan teguran atas sikap dan pandangan yang berseberangan dengan kebijakan partai (Kompas, 20 September 2002).

B. Konflik Eksternal Partai Golkar

Selain menghadapi tekanan dalam internal partai. Partai Golkar juga harus menghadapi resistensi dari masyarakat luas. Sebagian masalah eksternal adalah menghadapi tekanan politik dan sosial berupa stigmatisasi sebagai partai yang berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat yang berada pada posisi kecewa dengan

perilaku Golkar di masa lalu mencoba memanfaatkan momentum reformasi untuk melampiaskan protes dan penghakimannya terhadap Partai Golkar. Beberapa resistensi masyarakat terhadap Partai Golkar, antara lain :

Tuntutan pembubaran Partai Golkar

Resistensi masyarakat pada prinsipnya adalah suatu proses, penolakan, atau pengingkaran terhadap eksistensi Partai Golkar yang semuanya berujung pada sebuah tujuan, yaitu delegitimasi dan demoralisasi terhadap eksistensi partai itu dalam lanskap politik domestik hingga penghilangan eksistensi itu sendiri (Alkhatab, 2009 :18). Tuntutan pembubaran Partai Golkar banyak berasal dari kalangan mahasiswa. Mereka menuntut Golkar bertanggungjawab atas segala krisis yang terjadi dan meminta Partai Golkar untuk membubarkan diri. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koordinasi Aksi Mahasiswa Indonesia Penggugat Golkar (Kami Penggal) dengan alasan bahwa Golkar menjadi kekuatan politik utama yang menghancurkan aspirasi rakyat (Nugroho, 1999: 100). Selain itu, Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) melakukan aksi di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Mereka juga menyuarakan pembubaran Partai Golkar (Kompas, 31 Maret 1999).

Beberapa bulan sebelum Pemilu 1999 dilaksanakan, aksi pengrusakan terhadap simbol-simbol Partai Golkar terjadi dimana-mana. Di Kabupaten Brebes, misalnya massa dari sebuah partai politik bentrok dengan massa Golkar yang sedang mengikuti acara hari ulang tahun partai yang disemarakkan dengan pasar murah di Stadion Karangbirahi. Sebelum massa tersebut tiba di lokasi, sepanjang jalan mereka mencabuti atribut Golkar lalu membakarnya di tengah jalan (Kompas, 7 Desember 1998). Aksi pengrusakan atribut Partai Golkar juga terjadi di Kota Tegal, dimana bendera-bendera Partai Golkar dicabut dari jalan kemudian disobek (Kompas, 8 Maret 1999). Di Kabupaten Purbalingga, awal April 1999,

sejumlah massa PDI-P menyerang massa Partai Golkar yang akan menghadiri acara temu kader yang dihadiri oleh Akbar Tandjung. Aksi penyerangan ini disertai dengan aksi pengrusakan terhadap atribut Partai Golkar dengan pembakaran sebuah mobil (Gatra, 24 April 1999).

Aksi dengan tuntutan pembubaran Partai Golkar kembali digelar Agustus 2000 oleh aksi bersama organisasi mahasiswa, seperti Forum Kota (Forkot), Forum Bersama (Forbes) dan Front Nasional. Mereka menilai Partai Golkar ikut merusak dan menghancurkan negara (Kompas, 4 Agustus 2000). Sementara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap arus balik politik Orde Baru yang dibawa oleh politisi binaan Golkar yang ditampilkan dalam citra reformis (Kompas, 5 Agustus 2000). Tuntutan yang lebih provokatif datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya yang mendesak DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Golkargate untuk membongkar kasus-kasus korupsi dan kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan Golkar di masa lalu (Kompas, 12 November 2000).

Pada akhir Januari 2001, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Reformasi Total meminta gerakan mahasiswa secara konsisten mewujudkan agenda reformasi dan memperjuangkan demokratisasi serta tidak terjebak dalam pertikaian elite politik. Menurut Sekber Reformasi Total, tuntutan utama untuk kembali ke reformasi total adalah pembubaran Partai Golkar. Dalam pandangan mereka Partai Golkar adalah partai garda depan yang melindungi seluruh kepentingan Orde Baru (Media Indonesia, 27 Januari 2001). Di Kudus, Massa PMII membakar bendera Partai Golkar di halaman kantor DPD Kabupaten Kudus diikuti dengan tuntutan agar pemerintah yang berkuasa membubarkan Partai tersebut. Resistensi terhadap Partai Golkar juga terjadi di luar Jawa. Di Medan, massa Front Reformasi Total (Frontal) menyuarakan perlunya pengadilan atas kejahatan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Golkar (Kompas, 10 Februari 2001). Aksi di Jakarta berlangsung massif hampir setiap pekan. Kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAM) menuntut pembubaran Partai Golkar karena partai tersebut diduga membiayai

gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid (Kompas, 2 Februari 2001). Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bersama Anti Golkar (Abang) melakukan orasi di kantor DPR di Senayan. Mereka menuntut pembubaran Partai Golkar kemudian dilanjutkan dengan pembakaran bendera Partai Golkar.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), KAM Jakarta, dan Jaringan Aksi Mahasiswa (Jarima) menuntut agar para penjahat politik Orde Baru diadili serta menuntut pembubaran Partai Golkar dalam aksi mereka di bundaran Hotel Indonesia (Kompas, 14 Februari 2001). Dua hari berikutnya, giliran Front Penyelamat Demokrasi (FPD), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Pijar Indonesia menuntut pembubaran Partai Golkar (Kompas, 16 Februari 2001).

Selain resistensi dari kalangan mahasiswa, resistensi juga datang dari kalangan individual. Sejumlah pengamat politik, diantaranya Arbi Sanit. Dalam curah pendapat yang diselenggarakan oleh kelompok kerja (Pokja) Petisi 50 dan Komite Waspada Orde Baru (KWOB), ia mengatakan bahwa Golkar merupakan salah satu dari empat pendosa yang harus bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru. Oleh karenanya, ia berpendapat tidak ada pilihan lain bagi Partai Golkar untuk membubarkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban itu (Kompas, 12 April 2001).

Dalam sebuah acara *talk show* bertema "Membangun Kultur Bangsa Pasca-Orde Baru" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni-UI) di Balairuang kampus UI Depok. Tujuh fungsionaris dari parpol berbeda berkumpul untuk "menghakimi Golkar". Diantaranya mereka adalah Ketua DPD PDI-P Roy B. Janis, Ketua PKP John Pieris, Ketua Umum Partai Murba Hadidjojo Nitimiharjo, Sekjen PAN Faisal Basri, Ketua Umum PADI Bambang Sulistomo, Sekjen PUI Yudilherly Justam dan anggota PPP Nasir Tamara. Para politikus tersebut bersama-sama menyepakati usulan agar Golkar dibubarkan dan tidak diperbolehkan mengikuti Pemilihan umum (Kompas, 19 Mei 1999).

Resistensi yang paling tajam datang dari Deklarator Ciganjur, yang merupakan pemimpin politik terkemuka, yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais. Sebelum pemilu 1999 dilaksanakan, ketiga tokoh politik itu bertemu di kediaman Alwi Shihab, salah seorang pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka membentuk front bersama untuk menghadang Partai Golkar. Mereka membentuk komunike bersama yang dimaksudkan untuk menekuk kekuatan Partai Golkar (Forum, 30 Mei 1999).

Diantara ketiga tokoh politik, yang paling getol menyerang Partai Golkar ialah Amien Rais. Ia selalu mengkampanyekan akan pentingnya melawan status quo yang harus dikubur. Ia bahkan secara khusus meminta pemantau asing untuk mengawasi Partai Golkar karena hanya Partai Golkarlah yang menurutnya melakukan kecurangan pemilu melalui money politics (Merdeka, 3 april 1999).

Pembekuan Partai Golkar

Di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), Partai Golkar turut berperan sebagaimana terlihat dengan adanya tiga menteri yang berasal dari Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla (Menteri Perdagangan dan industri), Mahadi Sinambela (Menteri Pemuda dan Olah Raga) dan Bomer Pasaribu (Menteri Tenaga Kerja). Partai Golkar juga berhasil menempatkan kadernya , yakni Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung RI. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung pun terpilih sebagai ketua DPR melalui sebuah proses politik yang dinamis pada Sidang Umum MPR 1999, dimana Akbar Tandjung mendapat dukungan kuat dari Partai-partai yang mempunyai wakilnya-wakilnya di DPR sehingga pada waktu pemungutan suara Akbar Tandjung mendapat dukungan mayoritas (Novianto, 2004).

Dalam perkembangannya, kebijakan, kinerja dan gaya pemerintahan Abdurrahman Wahid ternyata banyak memicu ketidakpuasan partai-partai politik. Abdurrahman Wahid dinilai mengabaikan kepentingan partai-partai yang ada dalam koalisi. Manuver politik Abdurrahman Wahid dalam menjawab berbagai tekanan justru dilakukan dengan mencopot Hamzah Haz (Menko Kesra) dan

Wiranto (Menko Polkam). Pencopotan Hamzah Haz menjadikan hubungannya dengan PPP memburuk. Dalam perkembangannya pula, Abdurrahman Wahid mencopot dua menterinya, yakni Laksamana Sukardi (Meneg Penanaman Modal) dan Jusuf Kalla (Menteri Perdagangan dan Industri). Langkah politik tersebut segera menuai reaksi keras dari partai-partai politik di DPR. Partai Golkar tidak bisa memahami alasan Abdurrahman Wahid mencopot menteri-menterinya tersebut.

Perseteruan presiden dengan DPR semakin mengeras menyusul terkuaknya skandal dana nonbujeter Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Abdurrahman Wahid. Peristiwa ini bermula dari keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk dapat menggunakan dana nonbujeter Bulog sebagai dana kemanusiaan di Aceh. Dana nonbujeter Bulog yang berada di bawah pengelolaan Yanatera Bulog tersebut diperkirakan mencapai 271 miliar rupiah. Dana tersebut sempat dicairkan 35 miliar rupiah sesuai permintaan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun mekanisme pencairan ini dinilai tidak wajar dan diketahui mengalir ke beberapa rekening yang tidak jelas (Novianto, 2004).

Bagi Fraksi Partai Golkar kasus tersebut perlu direspons secara politis oleh DPR, dimana fraksi-fraksi di DPR pada umumnya menyepakatinya. Dalam perkembangannya, 236 anggota DPR berinisiatif untuk mengajukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki skandal tersebut. Meskipun kubu Abdurrahman Wahid menolak pembentukan Pansus, dukungan mayoritas parlemen menjadikan agenda tersebut tidak terbendung. Dengan dukungan penuh 307 anggota DPR melalui voting terbentuklah Pansus Buloggate dan Bruneigate.

Setelah melalui beberapa proses panjang, Pansus tersebut akhirnya menarik kesimpulan bahwa patut di duga Presiden Wahid telah melakukan "penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan terhadap masyarakat dan lahirnya KKN baru. Kesimpulan Pansus tersebut di bawa ke proses politik yang lebih tinggi di DPR. Dalam rapat paripurna DPR Februari 2001 yang berisikan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan hasil kerja Pansus, mayoritas fraksi menyatakan dapat menerima Atas dasar itu, DPR pun mengeluarkan memorandum I kepada Presiden. Memorandum kepada Presiden dikuatkan dalam

keputusan DPR-RI Nomor: 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Soewarno, 2002: 56).

Memorandum pertama ini dimaksudkan untuk mengingatkan Presiden yang dianggap oleh DPR telah melanggar Haluan Negara, sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan / atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Pasal 7 ayat (2) : *"Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden"* (Kompas, 4 Februari 2001)

Presiden Abdurrahman Wahid menolak isi memorandum tersebut, serta menilai bahwa proses politik di DPR tersebut inkonstitusional. Pada 28 Maret 2001 Presiden Abdurrahman Wahid memberikan jawaban atas Memorandum I DPR. Tanggapan Abduraahman Wahid tersebut justru mendorong fraksi-fraksi di DPR membrikan tekanan yang lebih keras, sehingga keluarlah Memorandum II yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 47/DPR-RI/IV/2000-2001. Dijatuhkan memorandum kedua ini tidak serta-merta mengubah pendirian politik Abdurrahman Wahid yang menilai proses politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi tersebut adalah inkonstitusional (Tandjung, 2008: 280)

Setelah jatuhnya Memorandum II yang semakin melemahkan legitimasi kekuasaan Abdurrahman Wahid, Partai Golkar makin intensif memperkuat aliansi strategis dengan PDI-P dan partai-partai politik yang lain. Dalam konteks perseteruan politiknya dengan DPR, Presiden Abdurrahman Wahid beberapa kali mengancam akan mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Dalam situasi politik yang semakin membuat posisinya terjepit itu, pada dini hari 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya mengeluarkan maklumat yang intinya menegaskan pembekuan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam satu tahun, serta pembubaran Partai Golkar (Kompas, 23 Juli 2001).

Menanggapi maklumat Presiden Gus Dur, Akbar Tandjung segera melakukan langkah-langkah politik dengan meminta MPR untuk melakukan sidang istimewa. Hal tersebut disampaikan pada pers pada 23 Juli 2001 dini hari di Hotel Mulia. Bahkan, Akbar Tandjung mengatakan siap secara fisik menghadapi setiap kemungkinan terburuk (Novianto, 2004: 142). Dinihari itu juga Akbar Tandjung selaku Ketua DPR bertindak cepat mengambil inisiatif menghubungi Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, mengimbuai dan mendesak agar segera mengeluarkan fatwa terkait dengan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam perkembangannya, ternyata pihak MA merespons dengan sangat cepat. Dinihari itu pula Ketua MA, Bagir Manan pun mendatangi kantornya, merumuskan dan menandatangani draf fatwa MA yang ditunggu-tunggu pihak DPR. Dan, pada akhirnya pagi hari fatwa MA itu intinya menilai ketidakabsahan Maklumat Presiden (Kompas, 24 Juli 2001).

Sesuai permintaan DPR, ada tiga hal yang disoroti dalam fatwa MA yang dituangkan pada surat nomor KMA 419/7/2001 tertanggal 23 Juli 2001 itu. Mengenai pembekuan MPR/DPR seperti yang ditegaskan dalam Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid, MA berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk membekukan MPR/DPR. Soal percepatan pemilu, yang juga dipersoalkan DPR melalui surat Ketua DPR Akbar Tandjung Nomor KS.02/3709.A/DPR RI/2001, MA berpendapat, yang bisa menentukan pemilu dipercepat atau tidak adalah MPR, bukan presiden. Masalah pembekuan Partai Golkar, menurut Bagir Manan, Presiden tak memiliki wewenang. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, yang boleh membekukan Partai Golkar atau partai lain adalah Mahkamah Agung (MA), setelah ada putusan pengadilan (Kompas, 24 Juli 2001).

Singkat kata, Presiden Abdurrahman tidak dapat membekukan Partai Golkar, dan pada akhirnya Sidang Istimewa MPR dipercepat. Dalam sidang tersebut, Megawati Soekarnoputri secara resmi dipilih menjadi Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid. Setelah melalui voting, sebanyak 591 anggota menyatakan setuju memberhentikan Presiden abdurrahman Wahid.

C. Dampak konflik terhadap perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004.

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Suharto jatuh. Meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal dengan pemilu 1999. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia dirubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik. Beberapa perubahan penting dalam amandemen yang berkaitan dengan pemilu adalah dalam hal mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden dan dibentuknya lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan terjadi juga pada pola rekrutmen kepala daerah yang efektif dilakukan setelah pemilu nasional 2004.

Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu. Terkait dengan DPD, kehadiran lembaga ini menjadikan konsep perwakilan yang dianut Indonesia bergeser dari "*unicameral*" menjadi *bicameral*. Secara prinsip, konsep perwakilan yang ada di DPD, sesuai namanya adalah representasi ruang/daerah. Ide perwakilan ruang ini terbentuk untuk mengkompensasi kelemahan dalam perwakilan politik yang ada di DPR. Di DPR, terjadi ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa yang disebabkan oleh konsentrasi jumlah penduduk berada di Jawa. Akibatnya, jumlah wakil yang ada di DPR lebih banyak berasal dari daerah di Pulau Jawa dibandingkan wakil dari daerah di luar Pulau Jawa. Dengan hadirnya DPD, ketidakseimbangan itu berusaha diatasi (Pamungkas, 2009: 101).

Pemilu 2004 dapat dikatakan sebagai jalan yang baru bagi Indonesia dalam memasuki era demokrasi perwakilan. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan konstitusi seperti yang disebutkan diatas, dan pada sisi yang lain

adalah efek dari kebebasan terhadap metode berpolitik actor-aktor dan civil society. Jumlah pemilih pada pemilu 2004 untuk pemilu legislative adalah 145.701.637 orang atau setara dengan 67,57% jumlah penduduk. Mereka yang dapat menjadi pemilih adalah semua warga Negara yang pada hari pemungutan suara (1) sudah berumur 17 tahun atau (2) sudah/pernah kawin, meskipun belum mencapai 17 tahun. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebelumnya harus terdaftar sebagai pemilih, dengan syarat (1) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (www.kpu.co.id).

Partai politik yang dapat mengikuti pemilu adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. Kedua, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi. Ketiga, memiliki sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik. Keempat, pengurus Partai Politik harus mempunyai kantor tetap. Terakhir, mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Berdasarkan persyaratan tersebut, terdapat 24 partai politik yang dinyatakan lolos mengikuti pemilu (Pamungkas, 2009: 105-106).

Dibandingkan pemilu 1999, antusiasme pemilih pada pemilu 2004 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu hanya mencapai 84%, atau turun sekitar 7% dari pemilu sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, khususnya setelah pemilu 1999, Partai Golkar telah mampu membuktikan dirinya sebagai partai politik yang dengan cepat melakukan perubahan dan konsolidasi. Gejolak politik yang demikian dramatis, mampu dihadapi dengan baik. Partai ini menghadapi banyak konflik, baik konflik internal maupun eksternal. Akan tetapi, semua itu bisa diatasi dan dilewati dengan baik. Dikatakan baik, karena partai ini terbukti masih tetap eksis, mampu mengkonsolidasikan diri dengan baik di tengah gelombang badai politik. Sehingga dampak konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar tak berimbas pada hasil pemilu 2004 (Novianto, 2004).

Kerja keras Akbar Tandjung dan seluruh jajaran Partai Golkar membuahkan hasil yang signifikan. Tidaklah mengherankan bila posisi nomor dua dalam perolehan suara Pemilu 1999, meningkat menjadi nomor satu pada Pemilu 2004. Pada pelaksanaannya, pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar dengan perolehan suara sekitar 21,58% . Unggul dari pemenang pemilu 1999 yakni PDI-P yang hanya memperoleh 18,3%

Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilu 2004

No	Nama Parpol	Jumlah Suara (%)
1.	PNI Marhaenisme	923.159 (0,18%)
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397 (0,56%)
3.	Partai Bulan Bintang	2.970.487(2,62%)
4.	Partai Merdeka	842.541 (0,74%)
5.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764 (8,15%)
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654 (1,16%)
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952 (0,59%)
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455 (1,08%)
9.	Partai Demokrat	8.455.225 (7,45%)
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240 (1,26%)
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811 (0,75%)
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610 (0,79%)
13.	Partai Amanat Indonesia	7.303.324 (6,44%)
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290 (2,11%)
15.	Partai Kebangkitan bangsa	11.989.564 (10,57%)
16.	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020 (7,34%)
17.	Partai Bintang Reformasi	2.764.998 (2,44%)
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629 (18,53%)
19.	Partai Damai Sejahtera	2.414.254 (2,13%)
20.	Partai Golongan Karya	24.480.757 (21,58%)
21.	Partai Patriot Pancasila	1.073.139 (0,95%)
22.	Partai Serikat Indonesia	679.296 (0,60%)

23.	Partai Persatuan Daerah	657.916 (0,58%)
24.	Partai Pelopor	878.932 (0,77%)
Total		113.462.414 (100%)

Sumber : KPU

Menghadapi Pemilu 2004, kendala dan tantangan yang dihadapi Partai Golkar tidak sebesar pada saat menghadapi Pemilu 1999. Situasi politik sudah berubah. Peluang Partai Golkar untuk memenangkan pemilu tampak membesar. Sebagai partai modern, terbuka dan konsiten dengan AD/ART yang ada, menjelang pemilu legislatif 2004, Partai Golkar melakukan penjangkaran calon anggota legislatif yang dilakukan secara terbuka, dan melibatkan peran DPD provinsi dan kabupaten. Seleksi caleg partai-partai politik peserta pemilu kali ini lain dengan sebelumnya, terkait dengan berubahnya sistem pemilu. Tingginya minat kader Partai Golkar untuk menjadi caleg, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, menunjukkan bahwa partai ini tidak "lesu darah". Setelah tahap penjangkaran caleg selesai, maka tibalah masa kampanye dan pelaksanaan pemilu Pada 5 April 2004. Pada masa kampanye, Akbar Tandjung begitu gencar melakukan kampanye ke seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia guna mendongkrak suara pada pemilu nanti (Alfian, 2004: 245).

Tabel 4. Perolehan Suara Pemilu 2004 di berbagai daerah.

Peringkat	Parpol	%	Peringkat	Parpol	%	Peringkat	Parpol	%
N.A.D			Jawa Barat			Kalimantan Timur		
1.	Golkar	14.64	1.	Golkar	27.90	1.	Golkar	27.38
2.	PPP	13.12	2.	PDIP	17.51	2.	PDIP	13.89
3.	PAN	12.86	3.	PKS	11.44	3.	PKS	9.64
Sumatera Utara			Jawa Tengah			Sulawesi Utara		
1.	Golkar	20.46	1.	PDIP	29.17	1.	Golkar	32.32
2.	PDIP	14.91	2.	Golkar	15.42	2.	PDIP	16.23
3.	Demokrat	7.72	3.	PKB	14.85	3.	PDS	14.81
Sumatera Barat			D.I.Yogyakarta			Sulawesi Tengah		
1.	Golkar	28.71	1.	PDIP	26.15	1.	Golkar	38.25
2.	PAN	14.15	2.	PAN	17.82	2.	PDIP	6.94
3.	PKS	11.78	3.	Golkar	13.84	3.	PDIP	6.86
Riau			Jawa Timur			Sulawesi Selatan		
1.	Golkar	29.95	1.	PKB	30.63	1.	Golkar	44.34
2.	PDIP	10.23	2.	PDIP	21.04	2.	PKS	7.30
3.	PPP	8.12	3.	Golkar	13.09	3.	PPDK	6.65
Jambi			Banten			Sulawesi Tenggara		
1.	Golkar	24.73	1.	Golkar	21.52	1.	Golkar	36.81
2.	PAN	17.59	2.	PDIP	14.04	2.	PPP	11.33
3.	PDIP	11.16	3.	PKS	11.87	3.	PDIP	7.72
Sumatera Selatan			Bali			Gorontalo		
1.	Golkar	21.20	1.	PDIP	52.5	1.	Golkar	53.07
2.	PDIP	17.11	2.	Golkar	16.84	2.	PPP	13.01
3.	Demokrat	10.65	3.	Demokrat	6.39	3.	PDIP	6.09
Bengkulu			NTB			Maluku		
1.	Golkar	23.72	1.	Golkar	24.44	1.	Golkar	20.74
2.	PAN	9.00	2.	PBB	11.6	2.	PDIP	18.48
3.	PDIP	8.44	3.	PBR	8.67	3.	PDS	10.54
Lampung			NTT			Maluku Utara		
1.	Golkar	21.62	1.	Golkar	37.02	1.	Golkar	23.53
2.	PDIP	18.93	2.	PDIP	19.35	2.	PKS	10.57
3.	PKS	8.14	3.	PDS	5.87	3.	PDK	9.63
Bangka Belitung			Kalimantan Barat			Irian Jaya Barat		
1.	PBB	21.41	1.	Golkar	24.46	1.	Golkar	24.20
2.	PDIP	19.17	2.	PDIP	17.59	2.	PDIP	12.73
3.	Golkar	18.32	3.	PPP	8.38	3.	PDS	10.54
Kep. Riau			Kalimantan Tengah			Papua		
1.	Golkar	15.9	1.	Golkar	25.57	1.	Golkar	24.42
2.	PDIP	14.39	2.	PDIP	21.81	2.	PDIP	7.98
3.	PAN	11.47	3.	PPP	8.08	3.	PDS	6.27
DKI. Jakarta			Kalimantan Selatan					
1.	PKS	22.32	1.	Golkar	20.76			
2.	Demokrat	20.24	2.	PPP	14.18			
3.	PDIP	14.02	3.	PKS	10.71			

Tabel 5. Perolehan Suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999

Propinsi	Jumlah Suara	Prosentase	Peringkat
D.I Aceh	154.373	15,61	3
Sumatera Utara	1.128.529	21,84	2
Sumatera Barat	459.528	23,63	1
Riau	623.609	29,67	1
Jambi	400.495	34,67	1
Sumatera Selatan	1.378.668	39,01	1
Bengkulu	198.512	30,05	1
Lampung	636.570	19,38	2
D.K.I. Jakarta	541.346	11,15	4
Jawa Barat	5.439.334	23,60	2
Jawa Tengah	2.300.625	13,35	3
D.I Yogyakarta	258.748	14,34	3
Jawa Timur	2.510.025	12,66	3
Kalimantan Barat	511.513	29,84	1
Kalimantan Tengah	221.940	27,77	2
Kalimantan Selatan	357.278	24,04	1
Sulawesi Utara	811.899	49,48	1
Sulawesi Tengah	585.955	54,61	1
Sulawesi Selatan	2.481.914	66,50	1
Sulawesi Tenggara	505.345	63,07	1
Bali	196.984	10,38	2
NTB	735.733	42,18	1
NTT	759.156	40,83	1
Maluku	326.115	30,46	1
Irian Jaya	308.632	37,30	1
Timor Timur	168.592	48,66	1

Sumber: Kompas, 10 Maret 2002

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan PDI-P tahun 1999 dan 2004

Nama Partai	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Keterangan
Partai Golkar	23,7 Juta (22,4%)	24,5 Juta (21,6%)	+ 0,8 Juta (0,8%)
PDI-P	35,7 Juta (33,7%)	21,0 Juta (18,5%)	- 14,7 Juta (15,2%)

Sumber : Paige Johnson Tan, 2006: 92

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar menang di 26 dari 32 provinsi yang ada (81,25%). Provinsi yang belum dikuasai Golkar hanyalah Bali, Bangka Belitung, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, D.K.I Jakarta, dan Jawa Timur (www.pemilu.asia.com). Kemenangan Partai Golkar tersebut membuktikan bahwa partai ini mampu mempertahankan dukungan secara relatif stabil. Keunggulan Partai Golkar dalam pemilu 2004 adalah karena keberhasilannya mempertahankan pendukung, bukan karena keberhasilannya memperluas basis pendukungnya (Baswedan, 2004). Jika dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 1999, terdapat beberapa peningkatan suara. Akan tetapi peningkatan suara Partai Golkar tidaklah besar, karena hanya berkisar 0,5% – 3%. Peningkatan itu terlihat di 6 provinsi yakni N.A.D, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

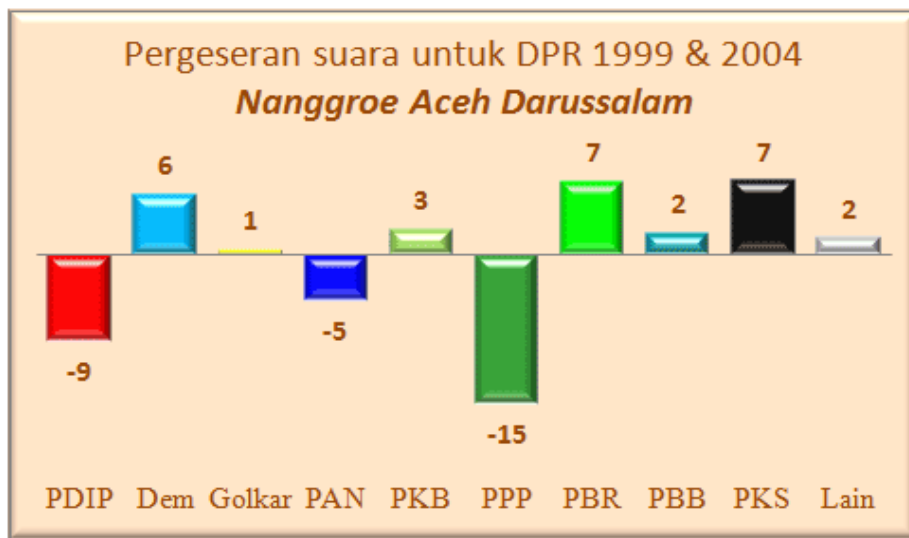
Analisis peningkatan suara Partai Golkar di daerah

a. Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh merupakan basis politik partai-partai Islam dalam sejarah politik Indonesia. Suara PPP relatif lebih menonjol pada masa Orde Baru. Pada Pemilu 1955, menunjukkan bahwa Aceh adalah basis politik dari Partai Masyumi (Feith, 1955). Dalam pemilu Orde Baru, PPP sangat dominan di Aceh, bahkan provinsi ini merupakan basis terkuatnya. Pelaksanaan pemilu 2004 di Aceh dilaksanakan dalam situasi darurat militer antara TNI dan GAM. Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2004 di Aceh memang diluar dugaan, karena jika ada pemilu yang bebas dan demokratis, hasil pemilihan umum di Aceh relatif tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 1955 atau pemilu pada awal-awal Orde Baru (1971-1977) dimana Partai Islam yakni PPP selalu menjadi pemenangnya. Faktor kemenangan itu ialah pengaruh dan peran birokrasi lokal, dalam hal ini ialah Gubernur, sebagian bupati dan walikota yang memfasilitasi Partai Golkar dalam melakukan mobilisasi massa dan memberikan fasilitas dan kemudahan dan iming-iming bagi calon pemilih. Gubernur Aceh ialah kader Partai Golkar sejak masa Orde Baru (Nurhasim, 2004). Secara umum, kemenangan Partai

Golkar di Aceh menunjukkan bahwa mesin-mesin politik berupa mobilisasi massa sebagaimana sering terjadi di daerah darurat militer merupakan sarana efektif untuk mengarahkan massa untuk memilih. Apalagi secara prakteknya, pencoblosan pada 5 April 2004 di Aceh fasilitas dan tata cara pemilihannya kurang menjamin kerahasiaan pemilih dalam menyalurkan aspirasi politiknya (www.Koalisi-Ham.org). Kemenangan Partai Golkar di Aceh tidaklah mutlak. Partai Golkar hanya meraup 16,19% suara, menang tipis dari PPP yang memperoleh 13,84% dan PAN 13,31%.

Gambar 3. Pergeseran Suara Partai Politik 1999 & 2004 di NAD.



Sumber: www.pemilu.asia.com

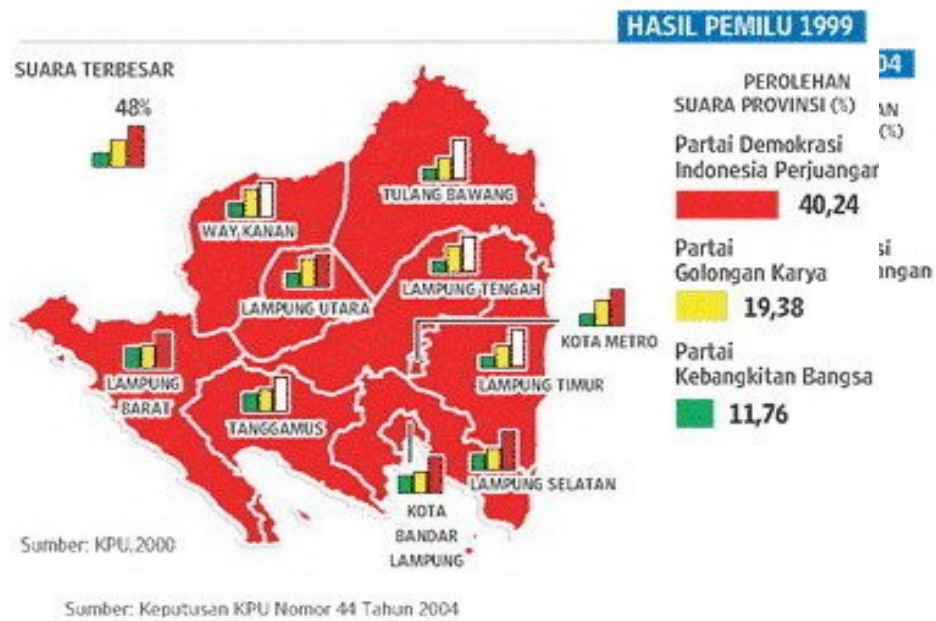
2. Lampung

Penguasaan suara partai bercorak nasionalis di Lampung sebagaimana yang terjadi dalam beberapa ajang pemilu sebelumnya masih terbelang kokoh. Persaingan ketat kini justru terjadi di antara sesama mereka. Semenjak berakhirnya Pemilu 1955 yang membawakan penguasaan suara partai-partai Islam hingga 58 persen, praktis dalam sejumlah ajang pemilu selanjutnya penguasaan partai nasionalis terjadi. Hasil Pemilu 1999, misalnya, yang kerap dijadikan indikator pemilu bebas pasca kepemimpinan rezim Orde Baru melambungkan kembali penguasaan suara partai nasionalis atas partai bercorak keislaman dengan proporsi yang terbalik. Saat itu, gabungan antara pemenang pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar mampu meraih 59 persen suara di Lampung.

Ajang pertarungan politik selanjutnya, lebih banyak bertutur mengenai perubahan penguasaan di antara partai nasionalis. Partai Golkar, yang memiliki sejarah kemenangan panjang pasca-Pemilu 1971, pada Pemilu 2004 mampu merebut kembali Lampung dari PDI-P. Tipis memang, hanya berselisih sekitar 3 persen. Namun, 7 dari 10 kabupaten dan kota di Lampung berhasil ”dikuningkan”. Saat itu, selain ibu kota provinsi, Bandar Lampung, kantong suara Partai Golkar tertinggi pada masa Orde Baru, seperti kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Way Kanan, kembali terkuasai.

Lampung akan terpaut pada persoalan begitu besarnya pengaruh yang datang dari luar wilayah ini. Semenjak era terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal (abad V-VII), pengaruh Sriwijaya (abad VII-XII), Majapahit (abad XII-XV), pengaruh Islam, Banten (abad XV-XIX), era kolonialisme Inggris dan Belanda, hingga periode setelahnya, Lampung tidak pernah terlepas dari pengaruh luar yang sekaligus juga mewarnai perjalanan kultur masyarakat setempat. Hal ini juga membawa dampak pada pemilu 2004, dimana Partai Golkar menjadi pemenang. Pada pemilu 1999, di pulau Sumatera hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung yang tidak memenangkan Partai Golkar. Selain itu, faktor turunnya kepercayaan masyarakat Lampung kepada Sosok Presiden Megawati. Berkuasanya partai nasionalis tidak lepas dari arus migrasi penduduk ke

wilayah Lampung, terutama pada era 1970-an. Terbesar, arus transmigrasi dari pulau Jawa yang secara langsung mengubah konfigurasi penduduk maupun politik (Litbang Kompas). Pergeseran suara dapat dilihat pada gambar 4. dibawah.



3. Sumatera Utara

Dalam era Orde Baru, wilayah ini tercatat menjadi salah satu lumbung Golkar, nyaris tidak ada kabupaten ataupun kota yang mampu direbut PDI maupun PPP. Menguatnya kekuatan nasionalis terlihat dari kemenangan PDI-P yang mampu meraih suara terbanyak (39,7 persen) pada Pemilu 1999. Panen suara PDI-P itu didapat terutama dari wilayah bagian utara, timur, dan barat Sumut, Karo, Toba Samosir, Simalungun, serta Nias. Wilayah-wilayah itu merupakan wilayah kantong suara Parkindo dan PNI. Sebagian besar masyarakat wilayah ini beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik.

Berbeda dengan meroketnya PDI-P, pamor politik Partai Golkar yang sebelumnya (1971-1997) selalu meraih suara terbanyak merosot tajam hanya meraih 21,8 persen. Di sisi lain, partai yang bercorak Islam, baik yang mengusung ideologi Islam maupun yang mempunyai basis massa tradisional Islam, perolehan suaranya tak lebih dari 10 persen. Perolehan suara mereka didapat terutama dari wilayah selatan Sumut, seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Padangsidimpuan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kalah dalam Pemilu 1999 tak membuat Golkar patah semangat. Sebaliknya, konsolidasi tokoh-tokoh partai ini, yang sebagian berasal dari Sumatera Utara, terbukti membuat Partai Golkar kembali memimpin pada Pemilu 2004. Dari 25 kabupaten dan kota se-Sumut, Golkar berhasil menguasai 18 kabupaten dan kota. Kemampuan Golkar menembus sekat-sekat agama dan suku dengan ideologi dan wajah “baru” membuatnya mampu merebut suara di wilayah yang dimenangi PDI-P pada pemilu sebelumnya. Sementara itu, PDI-P hanya mampu mempertahankan perolehan suaranya di wilayah yang merupakan basis fanatik kaum nasionalis sejak Pemilu 1955, yaitu Nias Barat, Tapanuli Utara, Karo, dan Deli Serdang (Kompas, 22 Mei 2009).

4. Kalimantan Tengah

Hampir semua wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah menggunakan wilayah DAS sebagai wilayah administrasi. Misalnya, DAS Barito yang menjadi Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan. Kemudian, DAS Kapuas, Katingan, dan Seruyan yang menjadi tiga wilayah kabupaten dengan nama yang sama. Daerah aliran sungai juga menjadi faktor penting untuk melihat identitas politik masyarakat. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya Sidik R Usop menjelaskan, pilihan politik masyarakat Kalimantan Tengah didasarkan pada kesukuan (Dayak), DAS, dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa pesta demokrasi di Kalteng. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Golkar saling berebut simpati di wilayah hulu dan hilir DAS.

Dayak merupakan etnis terbesar di Kalteng. Sensus Penduduk 2000 mencatat, sekitar 41 persen penduduk di Kalteng didominasi Dayak Ngaju, Sampit, Bakumpai, Katingan, dan Maayan. Selain itu, sekitar 24 persen penduduknya adalah etnis Banjar, 18 persen etnis Jawa, dan sisanya Batak, Madura, Minang, dan Tionghoa. Dayak sebagai penduduk asli Kalteng lebih memilih tinggal di wilayah pedalaman. Jarang masyarakat Dayak yang bermukim di wilayah pesisir. Ini disebabkan keberadaan orang Dayak yang telah mendiami seluruh bagian pulau Kalimantan (pesisir dan pedalaman) itu terdesak oleh kehadiran orang Melayu (Tjilik Riwuk, 1993). Etnis Dayak lebih nasionalis, tidak fanatik pada agama ataupun partai. Mereka cenderung mengutamakan heterogenitas dalam politik dan pemerintahan, serta lebih melihat pada kemampuan dan profesionalisme seorang tokoh. Sebagai contoh, di Kabupaten Gunung Mas yang penduduknya mayoritas beragama Kristen tidak memilih calon bertahan Julius Judae Anom yang beragama Kristen. Sebaliknya, dimenangi oleh Hambit Binti yang memakai identitas Islam. Rekam jejak dan kemampuan calon yang pernah menjadi Wakil Bupati Gunung Mas 2003-2008 tersebut menjadi penentu kemenangannya. Pada pemilu 2004 pun, suku dayak di Kalimantan Tengah melihat bahwa kepemimpinan Presiden Megawati dirasa tidak

memuaskan. Sehingga suara PDIP merosot tajam, PDIP hanya mampu meraih kemenangan di Kota Palangkaraya (Litbang Kompas).

5. Jawa Barat

Jawa Barat merupakan lumbung suara Partai Golkar paling besar di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, Jawa Barat juga menjadi salah satu daerah Partai Golkar. Daerah di Jawa lain sudah menjadi lumbung suara partai-partai lain. Sebagai contoh, Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan daerah pendulang suara terbesar bagi PDIP, kemudian Jawa Timur merupakan basis dukungan PKB, dan DKI Jakarta yang dulu pada Pemilu 1999 milik PDIP, maka pada pemilu 2004 merupakan daerah PKS (www.kompas.com). Pada tahun 2004 terjadi pemekaran wilayah di Jawa Barat yaitu provinsi Banten. Maka penambahan suara Partai Golkar di Jawa Barat hanyalah 3%, jika Banten masih menjadi wilayah Jawa Barat maka bisa mencapai 5%. Penambahan suara ini masih sama dengan daerah lain, disebabkan kekecewaan pada masa Presiden Megawati yang dinilai kurang sukses.

Analisis Kemenangan Pemilu 2004

Setidaknya ada beberapa factor yang menyebabkan posisi Partai Golkar signifikan dalam konstelasi politik Indonesia (Alfian, 2004: 248-250).

1. Faktor Akbar Tandjung. Faktor Akbar Tandjung sangat menentukan, berkarir sebagai politisi di Golkar sejak awal. Puncaknya, pada 1998 Akbar Tandjung terpilih menjadi ketua umum. Akbar Tandjung memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar, benar-benar efektif sebagai nahkoda yang mampu menggerakkan mesin partai sehingga berjalan dengan baik, bahkan di kala cuaca politik tengah memburuk. Akbar Tandjung sempat tertimpa kasus hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani proses hukum yang melelahkan, sebelum akhirnya Mahkamah Agung membebaskan dari segala tuduhan. Akbar Tandjung mampu memimpin Partai Golkar di masa-masa penuh cobaan itu. Akbar Tandjung adalah sosok pemimpin politik yang rasional-kalkulatif, yang mampu menggerakkan partainya tanpa harus terjadi personalisasi politik yang berlebihan (Dirk Tomsa, 2008)
2. Infrastruktur politik Partai Golkar yang kuat. Partai Golkar telah mampu mengkonsolidasikan kekuatannya setelah sempat tercerai-berai ketika gerakan reformasi bergulir. Jaringan modal, pewacanaan dan actor kembali terjalin secara solid. Dengan organisasi yang lebih solid, Partai Golkar kemudian berusaha masuk kembali ke dalam masyarakat dan mempengaruhi proses-proses politik (Pamungkas, 2009:118).
3. Golkar sudah terlanjur “mengakar”, sehingga sulit bagi yang lain, yakni mereka yang semula kader Golkar mendirikan partai-partai politik sendiri, untuk melakukan klaim politik sebagai “Golkar yang sesungguhnya”. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Edi Sudradjat dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R Hartono yang menggulirkan nama Siti Hardijanti Indra Rukmana (Tutut) sebagai calon presiden, pun sulit menyaingi Partai Golkar. Kenyataanya perolehan suara Partai Golkar jauh melesat di atas kedua partai tersebut (Alfian, 2004: 249)

4. Partai Golkar diuntungkan oleh kondisi di lapangan, di mana masyarakat banyak yang mengeluh soal merosotnya tingkat sosial-ekonomi mereka. Sebagian masyarakat merindukan romantisme masa lalu di zaman Golkar berkuasa pada masa Orde Baru (Pamungkas, 2009: 118). Mereka melihatnya secara sederhana: pada masa Orde Baru, tatkala Golkar berkuasa kondisi sosial-ekonomi tidak seburuk sekarang. Tema inilah yang tampaknya dipakai Partai Golkar untuk berkampanye. Di level bawah tema ini bisa amat efektif untuk kembali merebut dukungan.
5. Partai Golkar melakukan inovasi politik yang mampu menyedot perhatian public berupa konvensi partai. Konvensi partai dimaksudkan untuk mendapatkan calon presiden yang dinominasikan oleh Partai Golkar. Kebijakan internal Partai Golkar itu merupakan gagasan politik yang memperoleh liputan luas, yang menempatkan kembali Partai Golkar sebagai pusat perhatian. Bila partai-partai lain dapat dipastikan menetapkan ketua umumnya menjadi calon presiden, Partai Golkar justru memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh Golkar dan independen untuk berlaga di arena konvensi yang kompetitif dan terbuka. Konvensi akhirnya dimenangkan oleh Wiranto. Konvensi ini selain menyedot perhatian public juga mampu membangun citra Golkar sebagai partai yang berbeda dengan Golkar di masa Orde Baru (Heriyandi, 2006)
6. Sebagian besar pemilih yang memprotes Presiden Megawati yang juga Ketua Umum PDI-P miskin kinerja selama pemerintahannya. Mereka menganggap pemerintahan era Megawati tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sehingga mereka beralih kesetiaan untuk Partai Golkar dalam pemilu 2004 (Dirk Tomsa, 2008)

BAB V

PENIUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

Pada bulan agustus 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Perintah Presiden (Perpres) No. 193/1964 yang intinya menginstruksikan agar organisasi-organisasi yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi. Berdasarkan Kepres tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar. Pada pembentukan awal wadah ini tercatat sedikitnya 61 organisasi fungsional, termasuk militer (ABRI). Pada tanggal 17 juli 1971 melalui Musyawarah Sekber Golkar, Sekber Golkar diubah menjadi Golkar. Pada masa Orde Baru, Golkar berhasil membangun kelembagaan politik yang kuat, tercermin dalam organisasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Golkar menjadi kendaraan politik yang efektif bagi rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Ketika reformasi dan perubahan politik menuju demokrasi terjadi. Golkar sebagai pendukung utama rezim Soeharto ini kehilangan patron politiknya, dan bahkan kemudian dianggap paling bertanggung jawab atas berbagai keterpurukan yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk terus berperan dalam kepolitikan nasional, Golkar melakukan restrukturasi organisasi serta jaringan terhadap lingkungan eksternal baru yang telah berubah menjadi demokratis. Pada juli 1998, Golkar melakukan langkah strategis dengan melaksanakan Munaslub di Jakarta. Berdasar hasil munaslub itu, terpilihlah Akbar Tandjung sebagai ketua umum Golkar. Golkar juga merubah AD/ART antara lain Golkar berubah menjadi Partai Golkar, menghapus struktur Dewan Pembina, menghilangkan kepemimpinan tiga jalur (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) dan memiliki visi dan misi yang lebih demokratis.

Visi baru Partai Golkar yaitu : terbuka, mandiri, demokratis, moderat, solid, dan responsif. Sedangkan misi Partai Golkar yang baru yaitu Pertama, mempertegas sikap untuk menyerap, memadukan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat public. Kedua, melakukan rekrutmen kader yang berkualitas dan mendapatkan dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga permusyawaratan/perwakilan dalam pemerintahan. Ketiga, melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara melalui komunikasi dan sosialisasi politik. Perubahan besar ini juga disebut dengan Paradigma Baru Partai Golkar.

Dalam perkembangannya Partai Golkar dilanda krisis internal partai. Begitu banyak konflik-konflik yang terjadi di tubuh partai. Konflik pertama lahir oleh adanya perebutan kekuasaan setelah kejatuhan Soeharto pada bulan mei-juli 1998. Faksi-faksi yang pada masa Orde baru tergabung dalam kekuasaan Soeharto, bangkit untuk saling bersaing dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini terlihat pada dua kelompok yakni kaum reformis dan loyalis Soeharto. Setelah Munaslub 1998, banyak dari tokoh Golkar yang membentuk partai tandingan Golkar. Edi Sudradjat sebagai pihak yang kalah kemudian keluar dan membentuk partai sempalan dari Golkar, yakni Barnas. Siswono Yudhohusodo dengan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB). Konflik internal selanjutnya pada bulan Juli 1999 yakni perseteruan dua kelompok yang pro dan kontra Habibie. Kubu yang pro yang berasal dari kaukus Iramasuka, yakni DPD yang berasal dari Indonesia timur seperti Marwah Daud Ibrahim, AA Baramuli, Hariman Siregar dan Fanny Habibie. Kubu yang kontra di pimpin oleh Marzuki Darusman. Kedua kubu bersitegang masalah laporan pertanggungjawaban B.J Habibie dalam SU MPR 1999. Terakhir konflik mengenai penurunan Akbar Tandjung dari kursi Ketua Umum karena keterlibatannya terhadap skandal Bulogette. Konflik eksternal banyak muncul dari masyarakat terutama mahasiswa. Mereka menuntut pembubaran Partai Golkar yang dianggap sebagai sumber utama krisis. Partai Golkar juga dihadapkan terhadap keppres mengenai pembekuan Partai Golkar yang terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur.

Dalam pemilu multipartai pertama kali di era reformasi yakni pemilu 1999, perolehan suara yang dicapai oleh Partai Golkar cukup signifikan. Memang, bila dibandingkan dengan hasil-hasil pemilu Orde Baru prosentase perolehan suara Partai Golkar mengalami penurunan yang tajam. Pada pemilu terakhir Orde Baru, Golkar meraih dukungan suara sebesar 74,5%, sementara pada Pemilu 1999 perolehan suara Partai Golkar hanya 22,4%. Berkurangnya suara Golkar secara drastis tersebut tidak dapat dijadikan ukuran kegagalan. Meskipun banyak terjadi konflik internal sebelum pemilu 1999, Partai Golkar berhasil menempati posisi kedua di bawah PDIP yang meraup 33,7% suara. Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh. Dalam Pemilu 2004 terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pemilu 1999. Perubahan penting dalam pemilu ini yakni mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung. Dibentuk juga lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu 2004 jumlah pemilih untuk pemilu legislative adalah 145.701.637 orang atau setara dengan 67,57% jumlah penduduk. Begitu banyak konflik yang melanda Partai Golkar, tidak membuat partai ini menciut. Partai Golkar justru mampu bertahan dengan membuktikan sebagai pemenang pada Pemilu 2004. Partai Golkar mampu mengalahkan suara PDIP yang pada Pemilu 1999 menjadi peraup suara terbanyak. Partai Golkar meraih suara 21,58% dan memenangkan suara terbanyak di 26 provinsi ini karena Partai Golkar berhasil mempertahankan pendukungnya di daerah-daerah.

A. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis.

1. Teoretis

Dalam mengkaji tentang Dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004 ini digunakan teori dari Miriam Budiardjo tentang Partai Politik. Partai politik dipahami sebagai kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah

untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam partai tersebut. Kemudian fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik. Dalam hal ini Golkar yang dahulu merupakan suatu kelompok organisasi massa yang merupakan pilar utama penyangga Orde Baru. Ketika Orde Reformasi bergulir, agar tetap eksis dan tidak ditinggalkan pendukungnya mau tidak mau harus menjadi sebuah Partai Politik. Dalam Munaslub 1998, Golkar akhirnya menjadi sebuah Partai Politik yang berhak tampil dalam pemilu 1999. Perubahan itu juga menjadikan Golkar sebagai Golkar yang baru. Dapat dikatakan bahwa Golkar melakukan revolusi total untuk menyelamatkan dirinya dari amuk rakyat yang begitu benci dengan rezim Soeharto.

Dalam perubahan itu, Partai Golkar telah berhasil menuai hasil kerja kerasnya. Walaupun dalam perjalanannya diselimuti begitu banyak tekanan baik dari dalam dan dari luar partai. Akan tetapi semua itu terbayar lunas. Keputusan untuk merubah Golkar menjadi sebuah partai sangat laj jitu. Partai Golkar tak pelak ditinggalkan pendukung setianya. Hal ini mengindikasikan bahwa partai ini masih layak untuk tampil dalam perpolitikan tanah air. Partai Golkar masih dipercaya penuh oleh rakyat Indonesia. Ketika menjadi peserta pemilu 1999 secara mengejutkan Partai Golkar masih nangkring di posisi kedua dibawah PDIP. Meskipun perolehan suara Partai Golkar turun drastis bila dibandingkan pada masa Orde Baru. Hal ini cukup memberikan angin segar bagi Partai Golkar untuk tetap ada di masa Orde Reformasi. Dan ketika pemilu 2004. Secara mengejutkan juga Partai Golkar meraih suara terbanyak. Oleh karena itu, ketika system politik yang otoriter diganti dengan system yang demokratis, Golkar tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri karena potensi demokrasi tersebut sebenarnya telah ada dalam diri Golkar. Penyesuaian bukanlah proses yang berlangsung secara tiba-tiba. Bila suatu partai politik sama sekali tidak memiliki potensi kekuatan demokrasi, partai tersebut akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dan berperan, apabila terjadi perubahan yang menuju system demokrasi.

2. Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian tentang Dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004 adalah Partai Golkar masih memiliki eksistensi. Partai Golkar tak serta merta ikut hancur seperti masa Orde Baru. Akan tetapi Partai Golkar masih merupakan partai yang besar pada masa reformasi ini. Partai Golkar menunjukkan bahwa partai ini mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini terhadap pendidikan adalah memperkaya khasanah sejarah nasional yang bidang kajiannya multidimensional. Dinamika politik dari Partai Golkar ini dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah politik Partai Golkar yang selama ini telah melekat erat pada masyarakat Indonesia dan mengambil manfaat positif serta dari fakta sejarah tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Partai Golkar

Para tokoh Golkar dan kader-kadernya hendaknya mampu menghapus stigma buruk masyarakat terhadap partai. Pemikiran buruk rakyat tentang elite-partai yang hanya mampu menghambur-hamburkan uang rakyat harus di hilangkan. Para tokoh Golkar hendaknya bisa memimpin dengan hati bukan hanya dengan pikiran. Langkah konkret bisa diwujudkan dengan pemerintahan bersih tanpa adanya korupsi. Sehingga tujuan politik Partai Golkar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai, bukan hanya semata-mata meraih kekuasaan dan materi.

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol partai hendaknya mampu mengambil manfaat sebaik mungkin dari kinerja partai politik tersebut. Masyarakat harus dapat menjadi filter bagi kinerja para tokoh-tokoh partai di pemerintah. Masyarakat boleh saja menjadi elite politik partai, akan tetapi harus mampu melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas yang diemban. Jangan sampai ketika sudah menjadi elite partai politik akan lupa pada kesejahteraan rakyat yang merupakan tugas paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Busroh. 1989. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: UGM Press.
- _____. 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar Tandjung. 1998. *Menuju Kelahiran Partai Golongan Karya: Pokok-Pokok Paradigma Baru*. Jakarta: DPP Partai Golkar.
- _____. 2003. *Moratorium Politik: Menuju Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta: Golkar Press.
- _____. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia.
- Alfian Alfian. 2002. *Memenangkan Hati Rakyat: Akbar Tandjung dan Partai Golkar (1998-2004)*. Jakarta: Bende Press.
- Ali Murtopo. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Andreas Pandiagan. 1996. *Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Anies Baswedan. 2004. *Political Islam In Indonesia: Present and Future Trajectory*. California: University of California Press.
- Arif Yulianto. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Arifin Rahman. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Bimo Nugroho. 1999. *Golkar Retak ?*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Boileau, Julian. 1983. *Golkar: Functional Group Politics In Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Deden Ridwan. 2003. *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktek Politik Akbar Tandjung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Logos Wacana.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hairus Salim. 1999. *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Helius Sjamsuddin. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____ & Ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Heriyandi Roni. 2006. *Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca Orde Baru (1998-2004)*. Depok: FISIP Universitas Indonesia.
- Ichlasul Amal. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- _____. 1993. *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Pratignyo. 1984. *Lahirnya Golongan Karya: Perjuangan Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta: Yayasan Bhakti.
- Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T. 1979. *Parpol dan Golkar: Organisasi Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kholid Novianto. 2004. *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*. Bekasi: Sejati-Press.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Leo Suryadinata. 1992. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1998. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Nishihara, Masashi. 1972. *Golkar and The Indonesian Elections of 1971 (Monograph Series)*. Modern Indonesia Project. Cornell University. New York: Ithaca.
- Nugroho Notosusanto. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam.

- Patmono SK. 2001. *Golkar Baru Dalam Fakta dan Opini*. Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi.
- Reeve, David. 1985. *Golkar Of Indonesia An Alternative to the Party System*. New York: Oxford University Press.
- Riswanda Imawan. 1992. *Prospek Peranan Golkar Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Pamudji. 1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sidi Gazalba. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumbodo Tikok. 1988. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresco.
- Umar Alkhatab. 2009. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak.

Majalah

- Bambang Sujatmoko. 1998. Juli. "*Harap-Harap Akan Dipangkas*". Gatra. 28-31.
- Bima Arya Sugiarto. 2001. Januari 11. "*Menuju Institusionalisasi Politik*". Kompas. 4.
- Edy Budiwarso. 2001. November. "*Pilihan Getir Buat Akbar*". Tempo. 61-65.
- Heddy Lugita. 1999. Maret. "*Menghitung Akar Beringin*". Gatra. 73.
- Herry Mohammad. 1998. Juni. "*Wajah Lama, Gairah Baru*". Gatra. 3-6.
- Hidayat Tantan. 1999. Oktober. "*Massa Merancang, Habibie Memikul*". Gatra. 5.
- Iwan Himawan. 1999. Maret. "*Bekal Nama dari Daerah*". Gatra. 71-73.
- Koesworo Setiawan. 1999. Oktober. "*Skenario dari PATRA*". Gatra. 5-7.
- Krisnadi Yuliawan. 1998. Juli. "*Mengarungi Multigelombang*". Gatra. 23.
- Krisnadi Yuliawan. 1999. April. "*Manuver Adi: Membokong / Mendukung*". Gatra. 5-6.
- Mauluddin Anwar. 1998. Juni. "*Pohon Beringin Bergoyang: Munas Golkar Dipercepat Sejumlah Nama Beredar sebagai Calon Ketua Umum*". Gatra. 4-7.

- Nur Hidayat. 1999. Oktober. *"Masih Ada Jilid II"*. Gatra. 7.
- Priyo Sumbogo. 1998. Juli. *"Kisah Tentang Golkar, Pak Harto, dan anak-anaknya"*. Gatra. 5-7.
- Riswhanda Imawan. 1998. Juli. *"Menyelamatkan Perahu"*. Gatra. 2.
- Rachman Tolleng. 1979. Agustus. *"Golkar Hanya Perpanjangan Struktur Kekuasaan"*. Prisma. 79-83.

Surat Kabar

- "Banteng Ketaton" Gagalkan Silaturahmi Golkar". 1999. April 3. Suara Merdeka. 7.
- "Bentrokan Massa Golkar dan PDI Perjuangan di Brebes". 1998. Desember 7. Kompas. 6.
- "Akbar Diserang Pendukung Habibie". 1999. Oktober 21. Jawa Pos. 15.
- "Akbar Tandjung Ditahan". 2002. Maret 8. Kompas. 1.
- "Akbar Tandjung Pimpin Golkar". 1998. Juli 12. Kompas. 1.
- "Akbar Tandjung tak tahu persis Jumlah Cek". 2002. Januari 12. Kompas. 1.
- "Akbar Tandjung Ucapkan Selamat Kepada Megawati". 1999. Juli 17. Kompas. 4.
- "Deliar Noer: Dosa Orde Baru Tidak Termaafkan". 2001. April 12. Kompas. 4.
- "Demo Tuntut Adili Soeharto dan Bubarkan Golkar". 2000. Agustus 4. Kompas. 4.
- "DPD Partai Golkar di Jakarta Jadi Sasaran Demo Kelompok Mahasiswa". 2001. Februari 14. Kompas. 4.
- "Edi Sudradjat dan Meutia Hatta Bentuk Partai". 1998. Desember 16. Kompas. 4.
- "Famred Gelar Demo Anti Golkar". 1999. Maret 31. Kompas. 4.
- "Golkar Dapat Ancaman Serius". 1999. Januari 16. Kompas. 1.
- "Golkar Harus Tegakkan Kemandirian". 1998. Juli 15. Kompas. 4.
- "Golkar Mulai Dicederai". 1999. Mei 20. Kompas. 1.
- "Golkar Tak Gentar "Digembosi" ". 2000. Februari 19. Kompas. 1.
- "Golkar Terbukti Arogan". 1998. Oktober 21. Kompas. 1.

- "Kantor DPD Golkar Kediri Dikembalikan ke Pemerintah". 2001. Februari 10. Kompas. 5.
- "Kelompok Mahasiswa dan Pelajar Datangi Lagi DPD Golkar Jakarta". 2001. Februari 16. Kompas. 4.
- "Ketika Kredibilitas Jadi Taruhan". 2001. Februari 4. Kompas. 5.
- "Ketua MA Bagir Manan: Fatwa MA Diputuskan Bersama Hakim Agung". 2001. Juli 24. Kompas. 4.
- "Ketua Umum Golkar Dipilih Secara Demokratis". 1998. Juli 12. Kompas. 1.
- "Mahasiswa Gelar Demo Anti-Golkar". Oktober 21. Kompas. 4.
- "Mahasiswa Tuntut Bubarkan Golkar". 1999. Mei 19. Kompas. 1.
- "Mahasiswa Tuntut Presiden Mundur dan Pembubaran Golkar". 2001. Februari 2. Kompas. 1.
- "Manuver Golkar Disesuaikan Keadaan". 1999. Oktober 12. Kompas. 1.
- "Marzuki tak Setuju Muchyar Non-Aktif". 2002. Februari 8. Kompas. 4.
- "Munas Luar Biasa Golkar Juli 1998: Harmoko Takkan calonkan diri lagi". 1998. Juni 4. Kompas. 1.
- "Nasib Partai Golkar Ditentukan 30 Juli". 2001. Juli 24. Kompas. 4.
- "Parpol Perlu Rumuskan Format Kampanye yang Ketat". 1999. Februari 15. Kompas. 4.
- "Partai Golkar Tolak Revisi UU No. 22/1999". 2002. Februari 9. Kompas. 4.
- "PDR Memandang Habibie Bukan Orang Partai Golkar". 1999. Mei 1. Kompas. 4.
- "Pembersihan Bendera Partai Golkar di Tegal". 1999. Maret 8. Kompas. 4.
- "Pembiasan Dosa Soeharto Bisa Jadi Benih Revolusi Sosial". 1999. Mei 19. Kompas. 4.
- "Pemerintah Pengaruhi Keputusan MLB Golkar". 1998. Juli 14. Kompas. 1.
- "Penolakan Habibie Mulai Bermunculan". 1999. Mei 19. Kompas. 1.
- "Perolehan Suara Golkar Dalam Pemilu 1999". 2002. Maret 10. Kompas. 14.
- "PMII Jatim Desak Pembentukan Pansus "Golkargate" ". 2000. November 12. Kompas. 11.
- "Presiden Berlakukan Dekrit". 2001. Juli 23. Kompas. 1.

- "Ratusan Ribu Kader Golkar Memadati Senayan". 1999. Maret 8. Kompas. 1.
- "Sarwono: Golkar Hanya Onerdil Sistem yang Sah". 2001. Juni 7. Kompas. 4.
- "Tandjung Menyalip Edi". 1998. Juli 11. Kompas. 1.
- "Tidak Ditemukan Bukti Penyaluran Sembako". 2002. Januari 23. Kompas. 4.
- "Tiga Nasihat Tim Lima untuk DPP Partai Golkar". 2002. Februari 2. Kompas. 4.
- "YLBHI: Waspada Arus Balik Politik Orde Baru". 2000. Agustus 5. Kompas. 4.

Jurnal

Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era (<http://muse.jhu.edu/journals/csa/summary/v031/31.1.subianto.html>, (10 Agustus 2009))

Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy. ([http://www.google.co.id/#q=Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization&hl=id&prmd=o&ei=j2xgTOCLOoaGvgPmuMC3BQ&start=10&sa=N&fp=2c0735a1a278c121](http://www.google.co.id/#q=Indonesia+Seven+Years+after+Soeharto:Party+System+Institutionalization&hl=id&prmd=o&ei=j2xgTOCLOoaGvgPmuMC3BQ&start=10&sa=N&fp=2c0735a1a278c121), (23 April 2010))

Internet

- www.antaranews.com (13 Juli 2009)
- www.kammi-riau.co.id (13 Juli 2009)
- <http://feeds.feedburner.com/kreativitasdalambelajar> (17 Juli 2009)
- www.webkios.info/direktori (10 Agustus 2009)
- www.Tantra's.wordpress.com (10 Agustus 2009)
- www.Suarakarya-online.com (18 September 2009)
- www.kpu.co.id (3 April 2010)
- www.Koalisi-Ham.org (3 April 2010)
- www.pemilu.asia.com (23 April 2010)
- www.kompas.com (23 April 2010)
- www.muse.jhu.edu (10 Agustus 2009)
- www.jstor.org/stable/4128549 (10 Agustus 2009)

Lampiran 1

***Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era.* By Dirk Tomsa. London & New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series, 2008. Hardcover: 260pp.**

Almost immediately after the downfall of Soeharto's New Order regime in May 1998, most ordinary Indonesians, politicians, political analysts and scholars of Indonesian politics predicted that GOLKAR — the New Order's political machine — would crumble. Even during the heyday of the New Order, scholars had predicted that GOLKAR would not be able to survive the passing of the Soeharto era. Indeed a celebrated Indonesianist, Benedict Anderson, once dubbed GOLKAR a "living corpse". This book is a meticulous endeavour by Dirk Tomsa to explain how GOLKAR has managed to survive and even thrive in a free and fair electoral democracy. Tomsa argues that GOLKAR's success is due in large measure to the fact that it was the best-institutionalized party in post-Soeharto Indonesia. Yet at the same time he points out that even GOLKAR is not well institutionalized (p. 4), with its supremacy primarily due to the uneven institutionalization of the other parties — with the exception of PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party) — during the period of democratic transition since 1998. While Tomsa competently applies party institutionalization theories, he pays too little attention to the political-economy dynamics following the downfall of the New Order. In discussing GOLKAR's development after 1998, it is important to evaluate the depth and quality of *reformasi*, which was only half-heartedly executed. Post- Soeharto regimes could not afford to antagonize the old oligarchic elites that managed to maintain their influence by creating new political alliances. The endurance of GOLKAR cannot be separated from the fact that prominent New Order forces managed to systematically reorganize themselves in the new political system. As Vedi Hadiz and Richard Robison argue, these old forces successfully hijacked the new democratic institutions to pursue their predatory interests. Hence critics of *reformasi* politics argue that the period of democratic transition in Indonesia is more or less a continuation of the New Order minus the involvement of the military in politics. The 1999 election was a difficult period for GOLKAR given the political euphoria surrounding *reformasi*. Unsurprisingly, the party suffered big losses, garnering only 22.44 per cent of the popular vote, compared to more than 60 per cent during the New Order 176 *Book Reviews* era. At the same time, its second-place finish indicated that despite the prevailing political climate GOLKAR was still well supported by staunch New Order forces and their sympathizers. Given the fact that GOLKAR had been a household name for such a long period, it was well reified in the minds of most Indonesians. According to

Tomsa, GOLKAR's electoral success in 2004 — when it emerged as the party with the most seats — can be attributed to four main reasons. First, under the leadership of savvy politician Akbar Tandjung, GOLKAR underwent a process of institutionalization that prepared it well to compete in the election. Second, GOLKAR's well-equipped infrastructure and strong party stalwarts gave it an advantage over less well-organized parties. Third, GOLKAR's experience during the New Order authoritarian regime in co-opting traditional leaders — particularly in Eastern Indonesia — resulted in the persistence of traditional patron-client relations in several of GOLKAR's strongholds such as South Sulawesi (pp. 42–44). This appeared to be one of the most important factors that allowed GOLKAR to endure in a competitive party system. Fourth, swing voters who protested against Megawati's PDI-P's poor performance over the previous five years switched their allegiance to GOLKAR in the 2004 election. GOLKAR's survival capacity in the post-Soeharto era is largely due to its essential character as a political party, which was in fact built for the sake of short-sighted interests, instead of ideological rationale. GOLKAR was founded in 1964 as a conglomeration of army-supported anti-communist forces to become a functional group as an alternative to the party system, which was criticized for being too ideological. Under Soeharto, GOLKAR was a hegemonic political force that fulfilled the function of a party, although officially it was not referred to as such. This suggests that from the very beginning GOLKAR had no ideological stance, aside from being anti-communist. As the communists were systematically obliterated in 1966, GOLKAR was essentially a joint secretariat that assembled various political powers together. The military-backed New Order sought to achieve political legitimacy through regular but phony elections, with GOLKAR formed to be the ruler's party though not an independent ruling party. As the ruler's party under a three-decade undemocratic regime, it was only able to provide “ersatz” values. GOLKAR, nevertheless, was deeply entrenched in people's minds (p. 120). GOLKAR is very much driven by the party elite's craving for power for the sake of party interests, or more commonly their own. The defeat of Akbar Tandjung by Jusuf Kalla at the 2004 party congress clearly indicated that the party elite were convinced that Kalla — who was vice-president — as party chair would open up access to power and government resources. Such a strategy might be justified as a tactic of political survival, but at the same time it confirms GOLKAR's pragmatic attitude and appetite for power. As Vicky Randall and Lars Svasand argue, the institutionalization of a single party must contribute to the overall institutionalization of the party system and thence to democratization. But this has not been the case with GOLKAR and the institutionalization of the Indonesian party system. The concluding chapter of Tomsa's book paints a gloomy picture for Indonesia's democratic transition. GOLKAR is the best-institutionalized party, but the Indonesian party system has not been an indispensable factor in enhancing democracy. GOLKAR can be successful as an electoral machine, but it does not function well in aggregating and articulating its constituents' interests. This book would have been more revealing if the author had provided a succinct

comparative analysis of how the former authoritarian regime's principal political vehicle managed to capitalize its organizational superiority during the democratic transition. In Chapter Two Tomsa discusses the surviving former communist parties in Poland, Hungary and Russia, as well as former hegemonic parties such as the Taiwanese KMT or the Mexican PRI, but alas he does not take the diverse characters of those parties and their relations with the respective authoritarian regimes into account. Such an account would give a comparative perspective of GOLKAR's endurance.

Sumber : <http://muse.jhu.edu/journals/csa/summary/v031/31.1.subianto.html>
(10 Mei 2010)

Bentrokan Massa Golkar dan PDI Perjuangan di Brebes

Brebes, Kompas

Bentrokan antara massa Golkar dan massa PDI Perjuangan hari Minggu (6/12) di Brebes, Jateng, mengakibatkan 11 orang cedera dan harus dirawat jalan di rumah sakit terdekat. Selain itu, 15 mobil dan empat sepeda motor rusak, sebuah panggung pasar murah dan sejumlah bahan pangan porak-poranda.

Komandan Korem 071/Wijaya Kusuma Kolonel (Inf) M Noer Muis mengatakan, insiden sudah dianggap selesai. Ini dinyatakan setelah dilakukan pertemuan antara DPD Golkar Brebes, pengurus DPC PDI Perjuangan setempat, dan unsur Muspida, Minggu, sekitar pukul 13.00 WIB. Dari pihak PDI Perjuangan hadir Ketua DPC setempat, Tasroni. Pertemuan tersebut, ungkap Komandan Korem, antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa pihak-pihak yang terkait sepakat untuk mengupayakan agar insiden tersebut tidak berkembang lebih luas.

Dalam kapasitasnya sebagai komandan teritorial, Kolonel M Noer Muis meminta semua pihak agar berupaya untuk tidak saling terprovokasi dan mencegah agar tidak berulangnya insiden yang sebenarnya tidak

Komandan Kodim Brebes Letkol (Inf) Kiki Senjayani yang berada di lokasi kejadian menyesalkan terjadinya insiden tersebut.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Haryanto Taslam, Minggu malam, di Jakarta mengatakan, belum bisa memberikan komentar karena belum menerima laporan kejadian itu. "Sejauh ini kami belum mendapat laporan dari kawan-kawan di Jateng," katanya.

Dua acara bersamaan

Insiden hari Minggu itu terjadi ketika warga Golkar Brebes memperingati hari ulang tahun (HUT) Golkar dengan mengadakan pasar murah di stadion Karang Birahi. Hari itu kebetulan PDI Perjuangan mengadakan pelantikan pengurus di tingkat desa di Kluwut, Kecamatan Bulakamba (tidak jauh

sepeda motor melakukan konvoi menuju ke Kluwut. Sepanjang perjalanan dari Kaligangsa-Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Veteran, mereka mencabuti tiang bendera dan melolos bendera Golkar lalu membakarnya di tengah jalan. Hal ini membuat lalu lintas di jalur Brebes Kota macet lebih kurang dua jam. Setelah itu, massa ini bergerak menuju ke Stadion Karang Birahi, tempat akan berlangsungnya kegiatan pasar murah Golkar.

Saat itu di stadion baru saja berlangsung apel warga Golkar Brebes, dan dilanjutkan dengan pasar murah untuk umum. Ketika massa Golkar dan warga masyarakat umum, jumlahnya diperkirakan 7.000 orang, berkerumun di pasar murah, tiba-tiba muncul massa yang mengenakan atribut PDI Perjuangan.

Sesampai di stadion, massa PDI Perjuangan berusaha masuk ke stadion namun tertahan di pintu gerbang oleh aparat keamanan dan massa Golkar. Massa yang datang itu, menuntut agar Saripin, salah seorang kader PDI Perjuangan, yang dikabarkan ditahan aparat keamanan di stadion itu, segera dibebaskan. Butirannya, Golkar

kukan pemeriksaan di stadion. Ternyata kabar penahanan Saripin itu tidak benar. Dua orang itu kemudian berusaha menenangkan massanya sendiri, tetapi tidak digubris sehingga mulai terjadi bentrokan di pintu gerbang.

Ribuan orang yang berada di dalam stadion itu, termasuk yang sedang antri di pasar murah, yang berada di stadion itu berhamburan menyelamatkan diri.

Ketua DPD Golkar Jateng HM Hasbi dan Sekretaris DPD Golkar Jateng HM Tadjuddin serta pengurus Golkar lain menyelamatkan diri melalui pintu selatan dan dilarikan ke Hotel Dedy Jaya. Bentrok itu berlangsung dua jam sampai pukul 11.00 WIB, setelah massa PDI Perjuangan meninggalkan stadion. (nts/who/ush)

Kompas, 7 Desember 1998

